

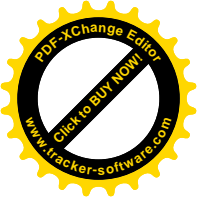
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH INKLUSIF
PADA PEMBELAJARAN DAN DAMPAK
PERKEMBANGAN SISWA BERKEBUTUHAN
KHUSUS DI SD NEGERI 2 BREBES**

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

**Oleh
Neysa Dika Putri
1401415345**

**JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusif pada Pembelajaran dan Dampak Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 2 Brebes" karya,

nama : Neysa Dika Putri

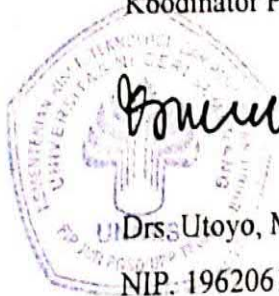
NIM : 1401415345

program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1

telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke panitia ujian skripsi.

Tegal, 7 Mei 2019

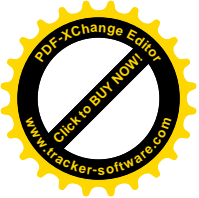
Mengetahui,
Koodinator PGSD UPP Tegal,



Drs. Utoyo, M.Pd.
NIP. 19620619 198703 1 001

Pembimbing,

Moh. Fathurrahman, S.Pd., M.Sn.
NIP. 19770725 200801 1 008



PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusif pada Pembelajaran dan Dampak Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 2 Brebes” karya,

nama : Neysa Dika Putri


NIM : 1401415345

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

telah dipertahankan dalam Panitia Sidang Ujian Skripsi Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019.

Semarang, Juni 2019

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd
NIP. 195908211984031001

Sekretaris,



Drs. Utoyo, M.Pd

NIP 19620619 198703 1 001

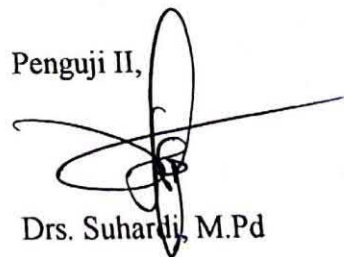
Penguji I,



Drs. Yuli Witanto, M.Pd

NIP 19640717 198803 1 002

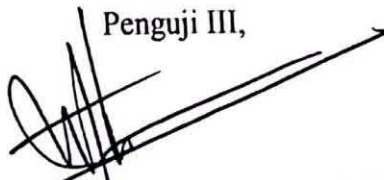
Penguji II,



Drs. Suhardi, M.Pd

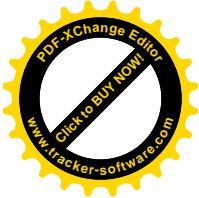
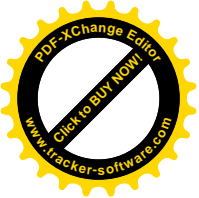
NIP 19570201 198103 1 006

Penguji III,



Meh. Fathurrahman, S.Pd., M.Sn.

NIP. 19770725 200801 1 008



PERNYATAAN

Dengan ini, saya

nama : Neysa Dika Putri

NIM : 1401415345

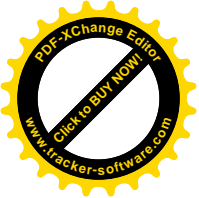
program studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1

menyatakan bahwa skripsi berjudul *Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusif pada Pembelajaran dan Dampak Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 2 Brebes* ini benar-benar karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang atau pihak lain yang terdapat dalam skripsi ini telah dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya secara pribadi siap menanggung resiko atau sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Tegal, 7 Mei 2019



Neysa Dika Putri
NIM. 1401415345



MOTO DAN PERSEMBAHAN

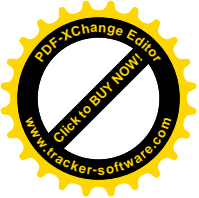
MOTO

1. Lebih baik menderita sekarang, kemudian menghabiskan sisa hidupmu menjadi seorang pemenang. (Mohamed Ali).
2. Karena setiap kehidupan adalah anugrah, anak dengan berbagai macam kebutuhannya. Mereka adalah inspirasi, untuk selalu mengingat sebaik-baik rasa bersyukur (Penulis).
3. Hidup itu berjalan, berani itu tuntutan, dewasa itu pilihan. (Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu Kalimah
2. Bunga Handika Putri
3. Bapak Sidin Supardi Sudir



ABSTRAK

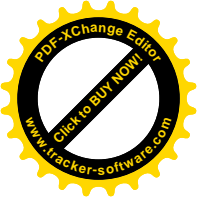
Putri, Neysa Dika. 2019. *Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusif pada Pembelajaran dan Dampak Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 2 Brebes*. Sarjana Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Moh. Fathurrahman, S.Pd., M.Sn. 583 halaman.

Kata Kunci : implementasi, pembelajaran, perkembangan, sekolah inklusif, siswa berkebutuhan khusus.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dilaksanakan dalam *setting* pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan dimana siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus belajar bersama di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya sesuai sistem zonasi. Pembiayaan pendidikan inklusif dari pemerintah yang terhenti membuat sekolah tidak dapat melaksanakan pendidikan inklusif sempurna sesuai regulasinya. Hal ini berdampak pada pembelajaran dan perkembangan siswa berkebutuhan khusus dikelas inklusif.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsi implementasi kebijakan inklusif pasca pembiayaan terhenti; (2) mendeskripsi pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di kelas IV; (3) menganalisis dampak perkembangan siswa berkebutuhan khusus lamban belajar dan tunadaksa dikelas IV. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi.

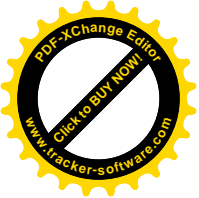
Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) sekolah masih berkomitmen menerapkan pendidikan inklusif dengan alasan prinsip non diskriminasi; (2) terhentinya biaya menyebabkan hambatan dalam pembelajaran dan perkembangan karena ketiadaan GPK, guru kunjung, pelaksanaan PPI, asesmen, layanan bina gerak dan program inklusif; (3) implementasi pendidikan inklusif pasca terhentinya biaya yaitu dengan pelaksanaan program jangka pendek berupa penambahan jam pelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus; (4) pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum reguler yang berlaku, metode, media, sumber belajar dan evaluasi di kelas inklusif disamakan namun guru akan menurunkan tingkat kesulitan apabila siswa berkebutuhan khusus tidak mampu mengikuti pembelajaran; (5) siswa lamban belajar mengalami perkembangan fisik dan sosial yang normal. Namun dalam perkembangan kognitif ia memiliki hambatan dalam pembelajaran. Perkembangan kognitif dan sosial siswa tunadaksa menunjukkan hasil yang positif. Hanya ia kurang mampu mengeksplorasi lingkungan dan mengikuti pembelajaran yang berkaitan dengan fisik sehingga guru memodifikasi penilaian fisik dengan penilaian kognitif yang sesuai dengan materi yang diajarkan.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusif pada Pembelajaran dan Dampak Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 2 Brebes”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah mengizinkan dan mendukung penelitian ini.
3. Drs. Isa Ansori, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan untuk memaparkan gagasan dalam bentuk skripsi.
4. Drs. Utoyo, M.Pd., Koordinator PGSD UPP Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan untuk memaparkan gagasan dalam bentuk skripsi.
5. Moh. Fathurrahman, S.Pd., M.Sn., dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, menyarankan, dan memotivasi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

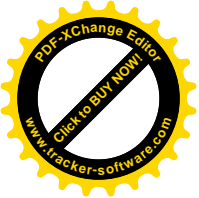


6. Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd., dosen wali yang telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan selama penulis menjalankan studi di Universitas Negeri Semarang.
7. Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Kampus Tegal Universitas Negeri Semarang yang telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
8. Yusti Puspitawati, S.Pd., M.Pd Kepala SD Negeri 2 Brebes yang telah memberikan izin untuk penelitian.
9. Bapak/Ibu guru SD Negeri 2 Brebes yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian.
10. Teman-teman mahasiswa PGSD UPP Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang angkatan 2015 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan lindungannya kepada pihak-pihak yang terkait serta membalasnya dengan lebih baik. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri.

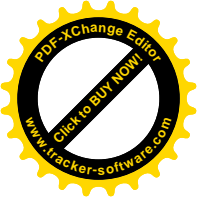
Tegal, 27 Maret 2019

Penulis

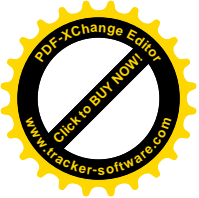


DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
GLOSARIUM.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB	
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
2. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teori	21
2.2 Kajian Empiris	82
2.3 Kerangka Berpikir.....	93
3. METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	96
3.2 Subjek Penelitian.....	98
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	98
3.4 Prosedur Penelitian.....	99
3.5 Data dan Sumber Data	101

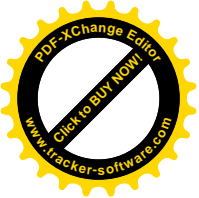


3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	104
3.7 Teknik Keabsahan Data	108
3.8 Teknik Analisis Data.....	112
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	117
4.2 Temuan Penelitian.....	130
4.3 Pembahasan	171
4.4 Implikasi Penelitian	198
5. PENUTUP	
5.1 Simpulan	199
5.2 Saran	202
DAFTAR PUSTAKA	204
LAMPIRAN.....	215
DAFTAR SITASI JURNAL.....	562



DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Berkebutuhan Khusus
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBS	Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
D	Dokumentasi
GPK	Guru Pendamping Khusus
KKG	Kelompok Kerja Guru
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MKKS	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MKPS	Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
O	Observasi
P4TK	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PPI	Program Pembelajaran Individual
RKASJP	Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang
RKAS	Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah
RKASJM	Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah
RKASJP/T	Rencana Kerja Sekolah Jangka Pendek/Tahunan
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SLB	Sekolah Luar Biasa
W	Wawancara



GLOSARIUM

Anak berkebutuhan Khusus, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak normal seusianya sebagai dampak dari keterbatasan yang dimiliki baik dalam kognitif, fisik, perilaku, mental, emosi maupun sosial. Serta pada anak-anak yang memiliki kelebihan dan bakat istimewa.

Implementasi, implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pembelajaran, pembelajaran merupakan kegiatan penanaman dan perubahan perilaku melalui proses transfer ilmu oleh guru dan siswa secara berkesinambungan yang menghasilkan suatu pengetahuan.

Perkembangan, perkembangan merupakan suatu proses perubahan baik fisik, mental, kognitif, dan sosial pada diri individu yang berpengaruh kepada kemampuannya untuk beradaptasi menuju pendewasaan menjadi manusia seutuhnya.

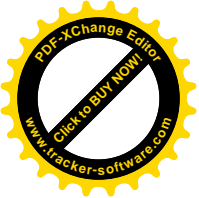
Tunadaksa, tunadaksa merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dalam fisik baik otot rangka maupun syaraf yang berdampak pada kemampuan dalam mobilitas dan mengeksplorasi lingkungan.

Lamban Belajar, lamban belajar merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dalam kemampuan kognitifnya untuk memahami pembelajaran di sekolah. Memiliki IQ yang berada dibawah siswa normal namun diatas siswa tunagrahita.

Program Pembelajaran Individual, program pembelajaran individual merupakan suatu program yang di susun untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar bagi setiap individu anak berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristiknya.

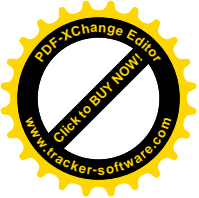
Asesmen, asesmen merupakan kegiatan merencanakan, mencari dan menggali informasi mengenai siswa berkebutuhan khusus yang bertujuan untuk perencanaan dan pengembangan potensi siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran dan perkembangannya di sekolah.

Pendidikan Inklusif, pendidikan inklusif merupakan suatu penyelenggaraan pendidikan dimana siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler seusianya dalam kelas inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seuai dengan sistem zonasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah.



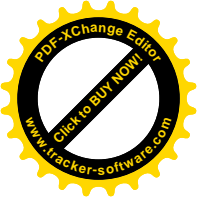
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Estimasi Prevalensi Disabilitas	41
Tabel 4.1 Jumlah Siswa	122
Tabel 4.2 Status Guru dan Tingkat Pendidikan	125
Tabel 4.3 Status Guru dan Jabatan	126
Tabel 4.4 Kegiatan Sekolah	127

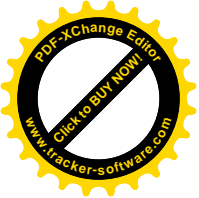


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Presentase Penduduk Penyandang Disabilitas	44
Gambar 2.2 Model-Model Adaptasi Kurikulum.....	63
Gambar 3.1 Skema Langkah Penelitian Kualitatif.....	99
Gambar 3.2 Skema Model Interaktif Analisis Data Kualitatif	113
Gambar 4.1 Peta Satelit SD Negeri 2 Brebes	118
Gambar 4.2 Peta Lokasi SD Negeri 2 Brebes	118
Gambar 4.3 Tampak Depan Sekolah	119
Gambar 4.4 Tata Tertib Sekolah	121
Gambar 4.5 Ikrar Pendidikan Karakter	122
Gambar 4.6 Halaman Sekolah	124
Gambar 4.7 Mushola SD Negeri 2 Brebes.....	124
Gambar 4.8 Ruang Inklusif	124
Gambar 4.9 Struktur Organisasi	126
Gambar 4.10 Prestasi Siswa	128
Gambar 4.11 Green House Sekolah.....	128
Gambar 4.12 Guru memberikan pengarahan	134
Gambar 4.13 Lemari di ruang inklusif	139
Gambar 4.14 Toilet Siswa	139
Gambar 4.15 Pelaksanaan Pembelajaran di kelas.....	140
Gambar 4.16 Media Pembelajaran bagi Siswa Berkebutuhan Khusus.....	142
Gambar 4.17 Buku Siswa dan Evaluasi Pembelajaran	143
Gambar 4.18 Map Portofolio	144
Gambar 4.19 Hasil Karya Siswa	145
Gambar 4.20 Contoh Form Asesmen	147
Gambar 4.21 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	148
Gambar 4.22 Program Pembelajaran Individual	149
Gambar 4.23 Penilaian Seni Musik	150

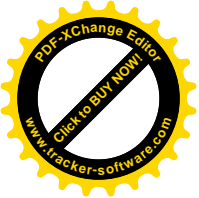


Gambar 4.24 Pembelajaran di Kelas Inklusif	155
Gambar 4.25 Soal Penilaian	158
Gambar 4.26 Pelaksanaan Penilaian	160
Gambar 4.27 Asesmen Siswa Lamban Belajar	165
Gambar 4.28 Asesmen Siswa Tunadaksa	168
Gambar 4.29 Perkembangan Sosial Siswa	170

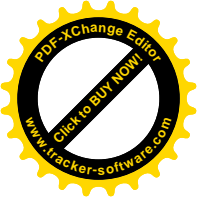


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data	216
Lampiran 2. Pengkodean	218
Lampiran 3. Data Informan dan Materi Wawancara	219
Lampiran 4. Data Informan dan Waktu Pengambilan Data	221
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Kepsek	227
Lampiran 6. Pedoman Wawancara Guru Kelas	229
Lampiran 7. Pedoman Wawancara Psikolog	232
Lampiran 8. Pedoman Wawancara Siswa Reguler	235
Lampiran 9. Pedoman Wawancara Siswa Reguler	239
Lampiran 10. Pedoman Wawancara ABK <i>Slow Learner</i>	243
Lampiran 11. Pedoman Wawancara ABK Tunadaksa	245
Lampiran 12. Pedoman Observasi Implementasi	247
Lampiran 13. Pedoman Observasi Pembelajaran ABK	248
Lampiran 14. Pedoman Observasi Perkembangan <i>Slow Learner</i>	251
Lampiran 15. Pedoman Observasi Perkembangan Tunadaksa	254
Lampiran 16. Pedoman Dokumentasi	258
Lampiran 17. Catatan Lapangan	260
Lampiran 18. Catatan Observasi	401
Lampiran 19. Catatan Dokumentasi	446
Lampiran 20 Reduksi Data	448
Lampiran 21 Display Data	488
Lampiran 22. Kesimpulan	489
Lampiran 23. Dokumentasi Observasi	504
Lampiran 24. Dokumentasi Wawancara	508
Lampiran 25. Lembar Catatan Aktifitas Penelitian	512
Lampiran 26. Form Asesmen Orangtua	516
Lampiran 27. Data Orangtua ABK	521



Lampiran 28. Form Asesmen Tunadaksa.....	523
Lampiran 29. Form Asesmen <i>Slow Learner</i>	528
Lampiran 30. Hasil Asesmen <i>Slow Learner</i>	532
Lampiran 31. Hasil Asesmen Tunadaksa.....	535
Lampiran 32. Daftar Peserta Didik Kelas Inklusif.....	539
Lampiran 33. SK Penetapan Sekolah Inklusif	541
Lampiran 34. Silabus Pembelajaran.....	544
Lampiran 35. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	545
Lampiran 36. Program Pembelajaran Individual	552
Lampiran 37. Program Inklusi	554
Lampiran 38. SK Koordinator Pendidikan Inklusif.....	555
Lampiran 39. Hasil Belajar Siswa di Kelas Inklusif	556
Lampiran 40. Surat Izin Penelitian.....	558
Lampiran 41. Surat Keterangan Penelitian	560
Lampiran 42. Surat Pernyataan	561
Lampiran 43. Daftar Sitasi Jurnal	563



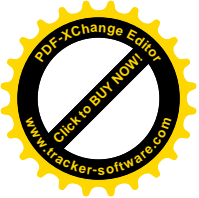
BAB 1

PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan skripsi ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lingkup penelitian, batasan istilah pokok, dan kerangka laporan. Berikut penjelasan selengkapnya.

1.1 Latar Belakang Masalah

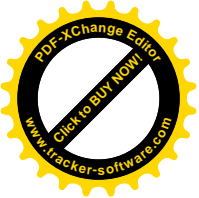
Pendidikan merupakan kebutuhan paling dasar untuk membangun kehidupan suatu bangsa karena menjadi modal utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, artinya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran. Usaha memajukan suatu pendidikan perlu dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Setiap negara memiliki tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Negara dikatakan sudah maju apabila tujuan pendidikan yang dirumuskan sudah tercapai dan memiliki kualitas yang baik. Tujuan pendidikan nasional Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan di Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki wawasan kebangsaan yang baik, mampu mengembangkan watak serta kehidupan yang bermartabat sehingga menjadi



manusia indonesia seutuhnya yang memiliki iman, bertaqwa dan memiliki jiwa demokratis serta bertanggung jawab terhadap negaranya.

Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat dipahami bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, berkepribadian, dan berkarakter. Pendidikan merupakan proses sepanjang hayat yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan majunya teknologi. Di setiap bidang kehidupan, pendidikan merupakan pondasi bagi seseorang untuk dapat masuk dalam suatu lingkungan baru. Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan seseorang. Setiap keputusan dalam dunia pendidikan pastinya dipengaruhi oleh adanya kebijakan. Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan tentunya memiliki tujuan yang mulia yaitu tercapainya masyarakat maju dan modern. Konsep pendidikan saat ini baik pendidikan karakter maupun pendidikan inklusif memiliki pondasi yang kuat yaitu berasal dari kebijakan publik.

Thomas R dye (1981: 1) dalam Subarsono (2013: 2) menyatakan mengenai kebijakan publik yaitu, “Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, itu adalah kebijakan publik”. Thomas R dye mengembangkan definisi mengenai kebijakan publik dimana dalam praktiknya kebijakan publik dibuat sepenuhnya oleh pemerintah sehingga pemerintah berhak untuk melakukan atau tidak melakukan karena kewenangannya bukan terdapat pada pihak organisasi swasta. Konsep tentang pendidikan inklusif, jika ditarik dalam hal kebijakan publik sudah

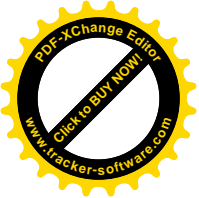


tertuang dalam beberapa aturan perundang-undangan maupun peraturan menteri dan peraturan daerah. Program yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita masyarakat merupakan suatu kebijakan umum yang berada dalam kewenangan pemerintah. Berdasarkan kebijakan yang dibuat, maka menghasilkan suatu proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Ripley dan Franklin (1986) dalam Subarsono (2013: 89) menyatakan bahwa kompleksitas implementasi bukan hanya ditunjukkan oleh banyaknya aktor maupun organisasi yang terlibat, tetapi dipengaruhi berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual maupun organisasional dan masing-masing variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Namun perlu dilakukan pengkajian apakah suatu kebijakan telah terlaksana dengan baik atau belum. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mendalam mengenai sebuah implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Karena dalam hal ini kebijakan tersebut menyangkut dalam pembelajaran Inklusif maka penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa (Direktorat PSLB, 2004).

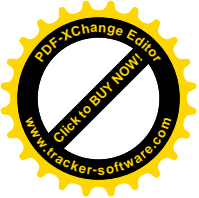
Ummah & Pambudy (2017) menyimpulkan bahwa kualitas pendidikan dapat memaksimalkan hasil, mengembangkan, dan mengimplementasikan program pendidikan agar peserta didik mendapatkan sebuah sistem pendidikan yang berkualitas dan efisien.

Inklusif diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu "*include*" atau "*inclusion*" atau "*inclusive*" yang berarti mengajak masuk atau



mengikutsertakan. Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan inklusif memiliki konsep penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada siswa berkebutuhan khusus sesuai jenisnya yang diatur dalam undang-undang untuk belajar bersama dengan siswa reguler di kelas inklusif yang di tetapkan melalui sistem zonasi oleh pemerintah kabupaten sehingga dalam pelaksanaannya siswa tersebut belajar bersama melalui pembinaan yang dilakukan oleh guru sesuai dengan karakteristik kebutuhannya.

Pendidikan inklusif di Indonesia sendiri didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak sebayanya. Belajar di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Konsep pendidikan inklusif yaitu adanya keterbukaan dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus dalam segala jenis dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan umum sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pendidikan inklusif tidak memandang latar belakang kehidupan anak, sehingga dalam prosesnya mereka akan mendapatkan pembelajaran sama seperti siswa normal lainnya. Sehingga diharapkan setelah adanya proses belajar, siswa inklusif dapat mencapai potensinya dengan baik. Putri (2015: 3) paradigma pendidikan kebutuhan khusus melihat individu anak dari sudut pandang yang lebih holistik yaitu melihat anak dari kebutuhan, hambatan belajar dan hambatan perkembangannya secara individual bukan dari label ketunaan yang dialami. Konsekuensi dari cara pandang ini melahirkan gagasan bahwa anak berkebutuhan khusus seharusnya dilayani pendidikannya bersama-sama di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.



Layanan pendidikan seperti ini dinamakan pendidikan inklusif yang bersifat *responsive* dan disesuaikan. Hal ini dirumuskan dalam Forum Pendidikan Dunia di Dakar (Dakar World Education Forum, April 2000).

Mardiyah, Dawiyah & Jasminto (2013: 54) berpendapat bahwa konsep, cara identifikasi, dan proses *treatment* dalam penanganan anak berkebutuhan khusus harus dipahami oleh pemangku kepentingan mulai dari guru reguler, psikolog, guru pendamping khusus hingga orangtua. Semakin dini diketahui adanya anak berkebutuhan khusus maka secara efektif *stakeholder* dapat merancang strategi bagaimana ABK tersebut mendapat perhatian, pendidikan, pembelajaran dan perkembangan yang tepat di sekolah inklusif. Imaniah & Fitriah (2018) berpendapat bahwa infrastruktur yang memadai juga perlu diberikan kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif demi keefisienan dan keefektifan siswa memahami pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan inklusif.

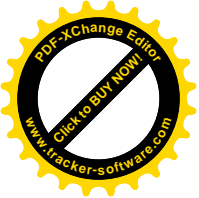
Burton (1984) dalam Siregar & Nara (2017: 4) mengemukakan pengertian belajar yaitu, “Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya”. Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 menyebutkan, “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Proses pembelajaran ini mengarahkan siswa agar mengenali sumber belajar dan lingkungan pendidikan yang sangat berguna bagi masa depan siswa. Winkel (1991) dalam Siregar & Nara



(2017: 12) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang berlangsung dan berkesinambungan dalam prosesnya dengan memperhatikan dampak dan kegiatan pendukung demi tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Gagne (1985) dalam Siregar & Nara (2017: 12), “Pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna”. Oleh karena itu, seseorang yang berpendidikan diharapkan dapat menjadi faktor pendorong dalam memajukan suatu bangsa. Namun, dalam proses berjalannya pendidikan itu sendiri tidak lepas dari kegiatan belajar. Belajar merupakan bagian dari dunia pendidikan. Manusia akan melaksanakan kegiatan belajar baik yang disadari maupun tidak.

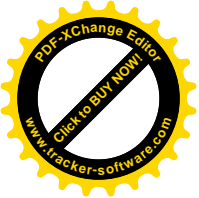
Kegiatan belajar itu dimulai dari awal masa kelahiran sampai akhir hayat manusia. Dalam kegiatan pembelajaran terjadi suatu proses perubahan tingkah laku. Pendidik dan peserta didik dalam prosesnya memiliki hubungan fungsional yang saling memengaruhi. Kegiatan pembelajaran dilakukan untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan. Tentunya dalam suatu kegiatan pembelajaran terdapat beberapa komponen yang mendukung proses tersebut. Salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam menghasilkan evaluasi hasil belajar adalah kurikulum. Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menyebutkan, “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Sebagai salah satu penyedia layanan pendidikan khusus,



pendidikan inklusif tentu memerlukan kurikulum dalam pelaksanaannya. Pada perkembangan kurikulum di Indonesia, kurikulum terakhir yang digunakan adalah kurikulum 2013. Kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya.

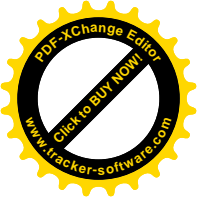
Seifert dan Hoffnug (1994) dalam Desmita (2012: 8) mendefinisikan perkembangan sebagai, *“Long term changes in a person’s growth, feeling, pattern of thinking, social relationship, and motor skills”*. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses kekal dan tetap menuju kearah tingkat pertumbuhan, kematangan dan belajar. Perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Perkembangan peserta didik mencakup segala perubahan yang bersifat terus menerus dari sederhana ke keadaan yang lebih lengkap, lebih kompleks dan lebih berbeda. Meliputi beberapa aspek baik fisik, kognitif, dan sosial. Perkembangan dialami oleh semua makhluk hidup tidak terkecuali. Baik yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus.

Santrock (1996) dalam Desmita (2012: 9) menjelaskan pengertian perkembangan bahwa sesuatu dapat disebut mengalami perkembangan apabila terjadi perubahan yang diawali dari konsepsi dan berlanjut mengikuti kehidupan seseorang sejak tahapan pertumbuhan hingga kematian. Pola tersebut bergerak kompleks karena menyangkut proses biologis, kognitif dan sosio emosional. Anak berkebutuhan khusus mengalami perkembangan yang sedikit berbeda dengan anak normal seusianya. Menurut Geniofam dalam Asih (2011: 2), “Anak



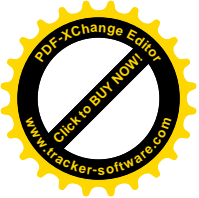
berkebutuhan khusus merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik sehingga anak berkebutuhan khusus juga memerlukan pendidikan untuk mengoptimalkan potensinya”. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 129 Ayat (3) menetapkan penggolongan karakteristik peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra atau hambatan dalam penglihatan; b. tunarungu atau hambatan dalam pendengaran; c. tunawicara atau hambatan dalam berbicara dan berinteraksi; d. tunagrahita atau hambatan dalam akademik; e. tunadaksa atau hambatan dalam mobilitas fisik motorik; f. tunalaras atau hambatan dalam perilaku; g. berkesulitan belajar seperti pada gejala diskalkulasia, disgrafia dan disleksia; h. lamban belajar atau hambatan dalam akademik dan pembelajaran di sekolah; i. autisme; j. memiliki gangguan motorik yang berkaitan dengan *soft skills*; k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain yang merupakan golongan NAPZA; dan l. memiliki kelainan lain yang membuat peserta didik tersebut harus diberi layanan pendidikan khusus.

Kesulitan belajar sering diidentikkan dengan ketidakmampuan belajar, prestasi rendah, tidak dapat mengikuti pembelajaran yang berdampak pada ketertinggalan dalam dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Williamson & Paul (2012: 93) berpendapat bahwa dalam situasi pendidikan, lamban belajar dan istilah lain banyak digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang dipandang memiliki perbedaan dalam pembelajaran atau kesulitan belajar. Lamban belajar (*slow learner*) merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang



ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi (prestasi) yang telah ditentukan. Koswara (2013: 7) menyatakan, “*Learning disability* merupakan istilah yang mewadahi berbagai jenis kesulitan yang dialami anak terutama yang berkaitan dengan masalah akademis diidentikan dengan ketidakmampuan belajar, prestasi rendah, tidak dapat mengikuti pembelajaran yang berdampak pada ketertinggalan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah”. Anak yang mengalami kesulitan belajar akan berpengaruh kepada prestasi kognitifnya di sekolah.

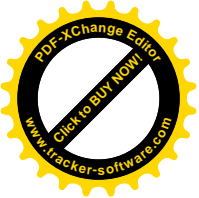
Sunanto (2009: 80) berpendapat bahwa dalam kelas inklusif jenis ABK dengan *learning disability* lebih banyak ditemukan disamping anak autis dan tunagrahita. Ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesulitan belajar anak. Menurut Ghufron & Risnawati (2016: 310) faktor secara umum yang berperan menjadi penyebab anak berkesulitan belajar adalah faktor biologi atau faktor organik, faktor genetika baik dari ayah maupun ibu si anak, faktor lingkungan tumbuh kembang anak dan faktor perkembangan. Beberapa faktor tersebut memiliki hubungan yang saling terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga perlu dilakukan suatu identifikasi sebagai bahan dasar asesmen dan pemberian *treatment* pembelajaran pada anak di kelas inklusif. Proporsi umur yang tertinggi pada anak *slow learner* dalam pembelajaran adalah anak dengan kelompok umur 15-16 tahun dengan persentase sebanyak 51,5%. Proporsi terendah anak *slow learner* berada pada rentang usia 11-12 tahun dengan prosentase yang lebih kecil hanya 3 % saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa



anak *slow learner* memiliki keterbatasan IQ yang berdampak pada kurangnya kemampuan untuk melaksanakan tugas sekolah (Amelia, 2016: 54-55).

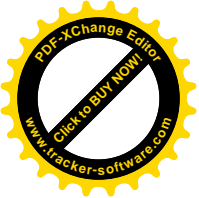
Kesulitan belajar spesifik ini tidak termasuk masalah belajar yang disebabkan secara langsung oleh adanya gangguan penglihatan, motorik, emosi, keterbelakangan mental, atau faktor lingkungan, budaya maupun keadaan ekonomi. Dengan demikian, anak yang memiliki gangguan lamban belajar tetap diberikan kesempatan dan persamaan hak. Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan mengenai pengertian disabilitas sebagai orang yang mengalami berbagai hambatan dalam berinteraksi sosial di masyarakat sebagai dampak atas keterbatasan yang dialami baik dalam fisik, emosional, mental maupun sosial yang membuatnya tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan.

Anak Tunadaksa dikategorikan sebagai anak yang mengalami kelainan fisik dan anggota gerak. Garnida (2015: 10) anak tunadaksa dapat dilihat dari segi fisik dan anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisiknya terganggu sehingga mengalami kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pada anak tunadaksa, banyak sekali karakteristik atau hambatan dalam fisik yang menyertai gejala kekurangannya. Hambatan tersebut berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, gerakan motorik, gangguan bicara sebagai dampak atas pengaruh kesulitan fungsi gerak yang dialaminya. Untuk meningkatkan fungsinya, diperlukan program dan layanan pendidikan khusus. Anak tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat orthopedi.



Lembaga penyelenggara pendidikan inklusif yang menerima siswa berkebutuhan khusus tunadaksa harus menyediakan aksesibilitas bagi kelancaran pembelajaran siswa tunadaksa. “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi tunadaksa guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan seperti akses terhadap berbagai bangunan, alat transportasi, alat komunikasi, serta berbagai fasilitas diluar ruangan termasuk sarana rekreasi” (Merdiasi 2013: 165). Lenka dan Kant (2013) berpendapat mengenai permasalahan siswa tunadaksa dalam bersosialisasi dengan lawan jenis serta prestasinya menunjukkan bahwa gender tidak mempengaruhi masalah sosial meskipun pada dasarnya permasalahan perempuan lebih kompleks dibanding laki-laki. Tingginya pemenuhan keinginan untuk diterima dalam kelompok akan menambah masalah sosial dibanding anak seusianya yang tidak memiliki keinginan tersebut.

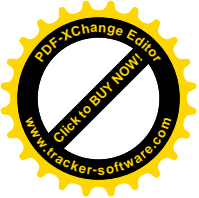
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dan Senin tanggal 3 Desember 2018 dengan Kepala SD Negeri 2 Brebes Ibu Yusti Puspitawati, S.Pd., M.Pd., Psikolog yang juga sebagai GPK dan guru kelas 1 Ibu Fitriah, S.Psi serta guru kelas 6 yaitu Ibu Dian Fatmawati, S.Pd. SD Negeri 2 Brebes memiliki 16 siswa berkebutuhan khusus yang tersebar dari kelas 1 sampai 6. Jenis kebutuhan khusus yang saat ini bersekolah di SD Negeri 2 Brebes adalah berkesulitan belajar dengan jenis lamban belajar (*slow learner*) dan tunadaksa. Anak yang termasuk *slow learner* yaitu 15 siswa dan 1 siswa tunadaksa. SD Negeri 2 Brebes berdiri sejak zaman kolonial Belanda dengan nama sekolah rakyat Sangkalputung kemudian tahun



1950 berganti nama menjadi SD Negeri 2 Brebes. Sekolah ini mendapatkan amanat inklusif melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Fernandes (2017: 125) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang bersifat *top down*. Artinya, kebijakan pendidikan inklusif idealnya diusulkan oleh sekolah sebagai penyelenggara.

Berdasarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 pasal 24 poin a, “Jumlah peserta didik sekolah dasar dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik”. SD Negeri 2 Brebes memiliki 10 kelas dan paralel untuk 5 kelasnya. Siswa dalam satu kelas berjumlah 28 orang dengan maksimal jumlah ABK nya yaitu 3 orang di setiap kelas. Menurut Kepala sekolah, sejak tahun 2009 sampai sekarang, SD Negeri 2 Brebes tetap kukuh memegang amanat sebagai sekolah inklusif meskipun pembiayaan pendidikan inklusif dari pemerintah provinsi sudah terhenti sejak tahun 2015. Wati (2014: 375) berpendapat bahwa komponen keuangan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen lain. Sehingga perlu adanya alokasi pembiayaan khusus untuk keperluan kegiatan asesmen input siswa, modifikasi kurikulum, insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, pengadaan sarana dan prasarana bagi ABK, pemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

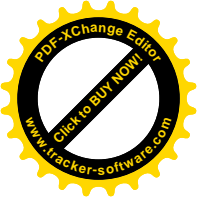
Sampai saat ini tidak ada SK yang menetapkan pencabutan sekolah inklusif dan pembiayaan kini dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Permendikbud RI No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa bantuan pendidikan atau yang biasa disebut BOS (bantuan



operasional sekolah) merupakan suatu bantuan bagi sekolah penyelenggara pendidikan yang digunakan untuk kegiatan operasional sekolah berupa uang atau jasa yang berasal dari pemerintah dan bukan orang tua siswa.

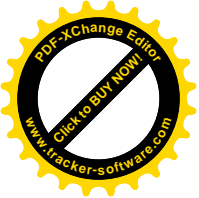
Hambatan dalam hal bantuan pembiayaan menyebabkan sekolah tidak mampu lagi menjalankan pendidikan inklusif sempurna sesuai regulasinya sehingga guru pendamping khusus tidak lagi dihadirkan dan merangkap sebagai guru kelas. Dampak lain adalah tidak adanya kunjungan guru dari SLB yang rutin diadakan sebagai pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus dan ketiadaan kelas khusus inklusif. Menurut Ibu Fitriah, S.Psi., psikolog yang kini menjadi guru kelas sekaligus guru pendamping khusus, bantuan dari pemerintah sudah tidak diberikan lagi sejak tahun 2015 sehingga kunjungan psikolog dari luar dan raport pribadi sudah tidak dilaksanakan lagi. Pembiayaan yang terhambat membuat seluruh pelaksanaan administrasi inklusif menjadi kurang maksimal.

Data dari Ibu Dian Fatmawati, S.Pd., yang merupakan guru kelas 6 sekaligus waka kesiswaan menjelaskan bahwa meskipun tidak ada regulasi penghentian sekolah inklusif dan ketiadaan biaya dari pemerintah provinsi namun SD Negeri 2 Brebes tetap berkomitmen menjaga status inklusifnya. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Konsistensi untuk tetap mengemban amanah mulia sebagai sekolah yang menerima semua jenis siswa dan keterbatasannya inilah yang menjadikan SD Negeri 2 Brebes sebagai sekolah inklusif terbaik di wilayah Brebes dengan julukan sekolah Adiwiyata, sekolah rujukan, sekolah model penanaman karakter agama islam, dan sekolah inklusif.



Manajemen penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 2 Brebes dilakukan melalui rekrutmen terbuka sesuai dengan sistem zonasi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pasal 12 ayat (1) poin b yang menyatakan, “Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya” sehingga dalam penerimaannya mengacu pada radius zona terdekat yang sesuai dengan kondisi di kabupaten Brebes. Rekrutmen peserta didik baru (PPDB) siswa berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di SD Negeri 2 Brebes dilaksanakan dengan 2 tahap. Yang pertama yaitu orang tua datang ke sekolah dengan membawa surat rekomendasi dari psikolog maupun lembaga konseling lainnya. Dan yang kedua yaitu siswa diterima pada pelaksanaan rekrutmen peserta didik kemudian seluruh siswa baru di kelas 1 dilakukan asesmen oleh sekolah. Hidayati (2016) berpendapat dalam pelaksanaan program asesmen terdapat beberapa aspek yang berpengaruh yaitu model asesmen, teknik asesmen dan analisis data hasil asesmen.

Dari hasil asesmen tersebut maka dapat diketahui apakah anak tersebut berkebutuhan khusus atau tidak. Kepala sekolah menyampaikan bahwa dalam pembelajaran, siswa berkebutuhan khusus memiliki standar dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tersendiri, meskipun kurikulumnya terintegrasi dengan siswa reguler yaitu menggunakan kurikulum 2013 namun siswa inklusif diberikan *treatment* berupa pendalaman materi tambahan sepulang sekolah untuk mengejar ketertinggalan mata pelajaran di sekolah. Dalam pelaksanaan evaluasi

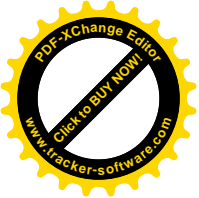


pembelajaran, guru kelas mendampingi siswa inklusif terutama siswa *slow learner* agar dapat mengerjakan tugas evaluasi dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2016) dari Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul *Evaluasi Program Asesmen bagi Anak Tunadaksa di Sekolah Luar Biasa Ganda Daya Ananda*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan program asesmen terdapat beberapa aspek yang memenuhi kriteria yaitu yaitu model asesmen, teknik asesmen, dan analisis data hasil, walaupun masih belum lebih spesifik pada asesmen tunadaksa. Pelaksanaan pembelajaran bagi anak tunadaksa belum mengakomodasi kebutuhan anak karena pembelajarannya masih disamaratakan dengan siswa lain yang mayoritas tunagrahita sehingga kurang dapat mengembangkan potensi anak tunadaksa.

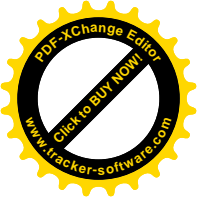
Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2011) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta*. Hasil penelitian menemukan bahwa pendidikan inklusif yang diselenggarakan di provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan belum semua kategori anak berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik program pendidikan inklusif.

Penelitian lain dilakukan oleh Choirunnisa (2014) dari Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul *Layanan Pendidikan bagi Siswa Berkesulitan Belajar*



Matematika (Dyscalculia) Di SD Negeri Giwangan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah melakukan asesmen antara lain dengan mengadakan tes IQ dan pengamatan kemampuan sehari-hari untuk menentukan layanan pendidikan yang diperlukan siswa. Program pendidikan individual disusun secara umum dan khusus. Siswa yang memiliki kesulitan belajar memperoleh pembelajaran yang sama dengan siswa lainnya di kelas inklusif, hanya untuk pembelajaran matematika dilaksanakan secara individual oleh guru pembimbing khusus. Perumusan tujuan, materi dan evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan rancangan modifikasi pembelajaran yang dibuat diawal semester. Metode yang digunakan adalah pengulangan dan latihan. Dalam pelaksanaan pendidikan untuk siswa berkesulitan belajar matematika (*dyscalculia*) guru pembimbing khusus memiliki peran yang lebih dominan daripada guru kelas. Padahal dalam *setting* inklusif seharusnya siswa menjadi tanggung jawab guru kelas.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pembelajaran dan perkembangan siswa berkebutuhan khusus berdasarkan kebijakan inklusif secara lebih mendalam melalui penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusif pada Pembelajaran dan Dampak Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 2 Brebes.” Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di SD Negeri 2 Brebes yaitu SD Negeri 2 Brebes merupakan salah satu sekolah inklusif di kabupaten Brebes yang masih menyelenggarakan pendidikan inklusif meskipun pembiayaan telah terhenti, karakteristik siswa yang unik dan jenis ABK yang beragam, peneliti ingin



mengetahui manajemen pendidikan inklusif, dan peneliti ingin mengetahui pola pembelajaran serta perkembangan siswa di sekolah inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

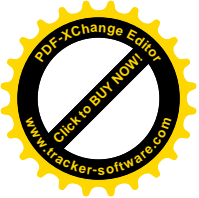
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- (1) Bagaimana implementasi kebijakan sekolah inklusif di SD Negeri 2 Brebes, Kecamatan Berebes, Kabupaten Brebes?
- (2) Bagaimana pembelajaran siswa inklusif kelas IV di SD Negeri 2 Brebes, Kecamatan Berebes, Kabupaten Brebes?
- (3) Bagaimana dampak perkembangan siswa berkebutuhan khusus lamban belajar dan tunadaksa kelas IV di SD Negeri 2 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tolok ukur berhasil tidaknya penelitian yang dilakukan. Jika tujuan penelitian tercapai, maka penelitian yang akan dilaksanakan berhasil. Tujuan penelitian memuat fakta yang dicapai dari fenomena di lapangan.

Pada bagian ini akan diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :



- (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan sekolah inklusif bagi guru dan siswa di SD Negeri 2 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
- (2) Untuk mendeskripsikan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus kelas IV di SD Negeri 2 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
- (3) Untuk menganalisis dampak perkembangan siswa berkebutuhan khusus lamban belajar dan tunadaksa kelas IV di SD Negeri 2 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

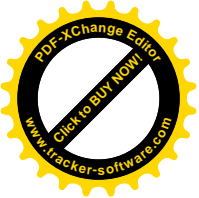
1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan praktis. Penjabarannya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

- (1) Memberikan konfirmasi tentang pelaksanaan kebijakan sekolah inklusif di SD Negeri 2 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
- (2) Mengetahui hambatan dan solusi pembelajaran siswa berkebutuhan khusus kelas IV di SD Negeri 2 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
- (3) Mengetahui dampak perkembangan siswa berkebutuhan khusus lamban belajar dan tunadaksa kelas IV di SD Negeri 2 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.



- (4) Memberikan kontribusi dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi pendidikan.
- (5) Memberikan kontribusi sebagai acuan dalam penanganan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kesulitannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

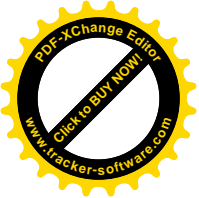
Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi guru, sekolah, dan peneliti lanjutan.

1.4.2.1 Bagi guru

- (1) Bahan acuan serta informasi mengenai layanan pendidikan bagi siswa *slow learner* dan tunadaksa.
- (2) Memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan inklusif pada pembelajaran dan dampak perkembangan siswanya.
- (3) Memberikan referensi mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
- (4) Pedoman dalam penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
- (5) Mengembangkan strategi, metode dan penggunaan media sehingga potensi siswa tercapai secara optimal.

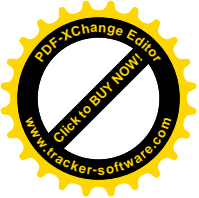
1.4.2.2 Bagi sekolah

- (1) Referensi untuk melakukan kajian tentang perkembangan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
- (2) Menjadi bahan informasi dalam supervisi.
- (3) Memberikan gambaran dalam manajemen pendidikan inklusif.
- (4) Acuan dalam proses pembelajaran di sekolah inklusif.



1.4.2.3 Bagi peneliti lanjutan

- (1) Bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan dalam bidang yang sama secara mendalam.
- (2) Mengembangkan kajian dan ilmu dalam bidang psikologi pada umumnya dan inklusif pada khususnya sehingga pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus terus berkembang.
- (3) Memberikan inovasi bagi pendidikan inklusif di Indonesia.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

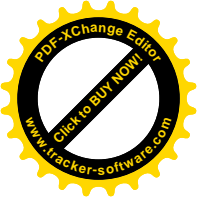
Kajian pustaka merupakan dasar dari teori yang akan digunakan dalam penelitian. Pada kajian pustaka akan dibahas tentang: (1) kajian teori; (2) kajian empiris; dan (3) kerangka berpikir. Uraianannya sebagai berikut:

2.1 Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan, sekolah inklusif, anak berkebutuhan khusus, anak berkesulitan belajar, anak tunadaksa, pembelajaran anak berkebutuhan khusus dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.

2.1.1 Implementasi Kebijakan

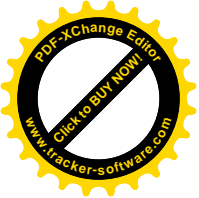
Implementasi sebenarnya menyangkut kreatifitas dari pelaksanaan kebijakan untuk merancang dan menemukan alat-alat khusus untuk mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan kebijakan negara pada umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum tentang tujuan dan berbagai macam sasaran yang masih harus dijabarkan kedalam program-program yang lebih rasional yang selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek. Sejarah munculnya kebijakan publik diawali pada tahun 1960-1970 an dimana terdapat kegagalan implementasi kebijakan karena keterbatasan kemampuan pemerintah sebagai *stakeholder* dalam memberikan peluang pelibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Atas fenomena tersebut mendorong berkembangnya



suatu konsep relasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat (Wahyuningsih, 2011: 32). Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam penentuan kebijakan publik. Suatu keputusan tidak serta merta dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak yang mendukung. Dalam implementasi kebijakan inklusif, berbagai komponen harus dipersiapkan secara matang termasuk pihak yang terlibat. Adanya evaluasi dalam kebijakan ini akan memperbaiki kekurangan yang ada dalam pelaksanaannya.

Kompleksitas kebijakan pendidikan berkaitan dengan konteks dinamika sosial politik dari praktek penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Masalah pendidikan adalah salah satu masalah yang bersifat universal. Bagi anak dan remaja, pendidikan merupakan suatu hak yang harus diterima baik melalui sekolah (*school education*) maupun luar sekolah (*out of school education*) (Rohman, 2012: 80-81). Salah satu akar masalah munculnya kebijakan pendidikan adalah permasalahan pemerataan dan kesempatan pendidikan. Permasalahan tersebut muncul karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan termasuk bagi seseorang yang memiliki kebutuhan khusus.

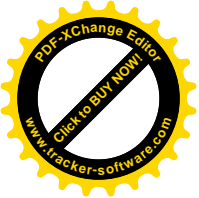
Perhatian pemerintah akan pentingnya pendidikan inklusif ditunjukkan dengan menerbitkan surat persetujuan tentang perlunya merancang sistem pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah juga berperan penting dalam menentukan pelaksanaan pendidikan inklusif diantaranya untuk membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan di bidang pendidikan inklusif, menyediakan guru khusus, memberikan subsidi berupa bantuan anggaran khusus dan dalam pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah, program pendampingan, monitoring dan evaluasi program, maupun dalam sosialisasi ke masyarakat luas (Ilahi 2013: 184).



Melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan inklusif. Kebijakan ini bertujuan agar setiap anak baik yang normal maupun berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang menyangkut berbagai hal yang berada dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, menyangkut keseluruhan proses dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan visi, misi, dan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Menurut Soebijanto dalam Rohman (2012: 85) mengatakan, “Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan, rencana induk tentang pendidikan, pengaturan pendidikan, kebijakan tentang pendidikan, serta istilah yang mirip dengan istilah tersebut”.

Di Indonesia pendidikan inklusif telah mulai dilaksanakan di sekolah tertentu. Hal ini sesuai dengan adanya Surat Edaran Dirjen Dikdasmen no 380/C.66/MN/ 2003 tentang pendirian pendidikan inklusi di tingkat kabupaten/ kota. Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB (*special education*) (Hendrowati, 2017).

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, pemerintah menjelaskan tentang prinsip dasar konsep pendidikan inklusif disertai dengan gambaran mengenai pentingnya memperjuangkan hak asasi anak berkebutuhan khusus dari sikap diskriminatif sekolah yang tidak memberikan akses layanan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan anak didik (Ilahi, 2013: 21). Melalui pendidikan inklusif, pembaruan pendidikan dapat dirasakan oleh semua pihak. Dalam kegiatan implementasi terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui oleh sekolah. Danarhari (2017) berpendapat bahwa ada tiga tahapan implementasi



kebijakan yang dilaksanakan oleh sekolah yaitu mengorganisasi, menginterpretasi dan mengaplikasikan kebijakan. Pendidikan inklusif diselenggarakan di sekolah reguler yang mendapatkan amanat dari pemerintah untuk melayani kebutuhan ABK dalam konteks pendidikan inklusif.

2.1.1.1 Bentuk kebijakan pemerintah

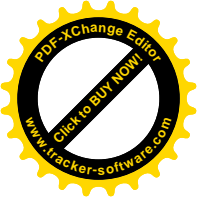
Pada hakikatnya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan secara optimal. Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peran aktif masyarakat dan lingkungan dapat di tunjukan dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan, penyediaan sumber daya manusia yang relevan dan profesional, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang meliputi penilaian dan evaluasi hasil belajar, pendanaan penunjang kegiatan dan output lulusan yang berkualitas.

Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diakomodasikan melalui wadah komite sekolah, dewan pendidikan, dan forum-forum pemerhati pendidikan inklusif di sekolah misalnya *parent support community* (Kustawan, 2012: 40).

Tugas dan fungsi pemerintahan (*Govarmance*) menurut Kustawan (2012: 42) adalah :

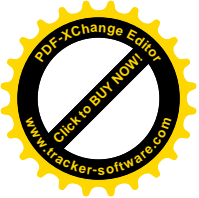
2.1.1.1.1 Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi menentukan kebijakan, implemementasi kebijakan dan



evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat nasional yaitu:

- (1) Pada tataran formulasi dan penetapan kebijakan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi menentukan kebijakan dan strategi implementasi pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pada tataran implementasi kebijakan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi mensosialisasikan kebijakan dan strategi penyelenggaraan implementasi pendidikan inklusif ke seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan kota/kabupaten serta mengkoordinasikan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dalam menjalankan kebijakan dan strategi implementasi pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pada tataran evaluasi kebijakan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi memonitor dan mengevaluasi implementasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan di beberapa kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Menerbitkan informasi secara berkala baik secara elektronik dan non elektronik tentang implementasi pendidikan inklusif sehingga semua pihak dapat mengetahui pembaruan informasi mengenai pendidikan inklusif.
- (5) Membentuk kelompok kerja pendidikan inklusif tingkat nasional.



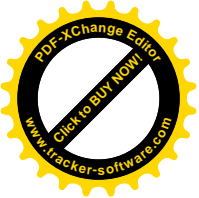
- (6) Mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan pihak terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bahwa tugas dan fungsi pemerintah pusat adalah :

- (1) Membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.
- (2) Membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (5) Melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

2.1.1.1.2 Pemerintah Provinsi

Secara umum tugas pokok dan fungsi pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan provinsi adalah menjabarkan kebijakan dan strategi implementasi

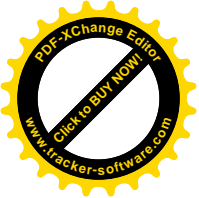


pendidikan inklusif yang telah digariskan oleh pemerintah pusat di provinsi masing-masing antara lain :

- (1) Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif kepada semua pemerintah terkait dalam menjalankan kebijakan dan strategi implementasi inklusif di provinsi masing-masing.
- (2) Menyusun rencana aksi dukungan atau fasilitasi pendidikan inklusif ke setiap kabupaten/kota dan ke sekolah inklusif.
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (4) Menyusun laporan implementasi pendidikan inklusif di provinsi masing-masing untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
- (5) Membentuk kelompok kerja pendidikan inklusif tingkat provinsi.

2.1.1.1.3 Pemerintah Kabupaten/Kota

- (1) Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan dan strategi implementasi pendidikan inklusif kepada pemerintah kecamatan, dan lembaga terkait di kabupaten/kota dan sekolah dalam menjalankan kebijakan dan strategi implementasi pendidikan inklusif di kabupaten/kota masing-masing.
- (2) Menyusun rencana aksi penyelenggaraan pendidikan inklusif di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kebijakan umum.



- (4) Menyusun laporan implementasi pendidikan inklusif di kabupaten/kota masing-masing untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (5) Membentuk kelompok kerja pendidikan inklusif tingkat kabupaten/kota.

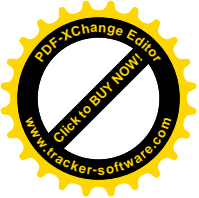
2.1.1.2 Faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam implementasi inklusif menurut Skorten dalam Asih (2011: 74) :

- (1) Kebijakan hukum dan perundang-undangan (regulasi), yaitu perlu adanya undang-undang khusus yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus, serta dukungan dana dalam implementasinya.
- (2) Sikap, pengalaman, pengetahuan, yaitu berkenaan dengan pengakuan hak anak serta kemampuan dan potensinya.
- (3) Kurikulum lokal, regional, dan nasional.
- (4) Perubahan pendidikan yang potensial.
- (5) Kerjasama lintas sektoral.
- (6) Adaptasi lingkungan.
- (7) Penciptaan lingkungan kerja.

2.1.1.3 Landasan filosofis implementasi kebijakan inklusif

Menurut Asih (2011: 75) secara filosofis, implementasi inklusif mengacu pada beberapa hal, diantaranya: a. Pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia baik itu normal maupun berkebutuhan khusus; b. setiap anak memiliki potensi



yang berbeda dan unik; c. setiap anak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan layak bagi pengembangan minatnya; d. Setiap elemen baik pemerintah, orangtua maupun masyarakat harus bergotong royong mengupayakan tercapainya tujuan pendidikan inklusif.

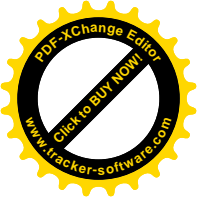
2.1.1.4 Komponen pengelolaan pendidikan inklusif

Pengelolaan pendidikan inklusif menurut Kustawan (2012: 48) bagi peserta didik berkebutuhan khusus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang meliputi komponen :

- (1) Kurikulum;
- (2) Proses dan hasil pembelajaran;
- (3) Administrasi dan manajemen satuan pendidikan;
- (4) Organisasi kelembagaan satuan pendidikan;
- (5) Sarana dan prasarana;
- (6) Ketenagaan;
- (7) Pembiayaan;
- (8) Peserta didik;
- (9) Peran serta masyarakat;
- (10) Lingkungan sekolah;
- (11) Rehabilitas sosial, edukatif dan medis.

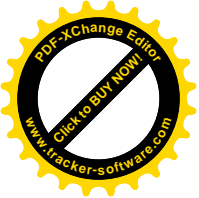
2.1.1.5 Keberhasilan implementasi

Keberhasilan implementasi pendidikan inklusif yang nyata adalah berada pada level sekolah. Kebijakan di bidang pendidikan saat ini antara lain dengan



kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, memberikan peluang yang besar dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Sekolah dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan yang fleksibel dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik yang beragam di kelas dalam setting inklusif akan memberikan peluang bagi pendidik untuk lebih meningkatkan kompetensinya. Seorang pendidik akan mendesain dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penuh empati (perhatian), melaksanakan berbagai strategi dan kegiatan alternatif karena peserta didiknya memiliki kecerdasan yang beragam dan akan melaksanakan penilaian dengan adanya penyesuaian-penyediaan cara, isi, waktu.

Berkaitan dengan sistem dukungan, terdapat beberapa peran orangtua, sekolah khusus (SLB), dan pemerintah yang perlu diperhatikan. Beberapa komponen terkait dengan lingkungan sekitar juga sangat menentukan bagi keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam menjalankan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai (Illahi, 2013: 184). Dalam konteks pendidikan inklusif, Alimin (2013: 178) berpendapat bahwa pendidikan inklusif akan berhasil jika para profesional pendidikan kebutuhan khusus menjadi narasumber yang fokus terhadap upaya penghilangan hambatan dalam pelaksanaan kelas inklusif di sekolah reguler. Hal ini bertujuan agar kebutuhan belajar anak dapat terpenuhi karena konsep pendidikan yang bersifat inklusif adalah menempatkan anak untuk saling mendukung secara kooperatif bukan kompetitif.



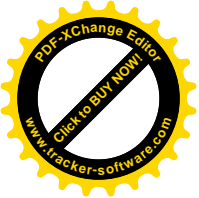
2.1.1.6 Lembaga pendukung pendidikan inklusif

Pusat sumber pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan sekolah luar biasa (SLB), perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, klinik, pusat terapi, rumah sakit dan puskesmas, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

2.1.2 Sekolah Inklusif

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, merupakan sekolah umum yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan, seperti keberadaan siswa berkebutuhan khusus, komitmen, manajemen sekolah, sarana prasarana dan ketenagaan. Ummah dan Pambudy (2017) menyatakan, “Berdasarkan konsep manajemen pendidikan, pendidikan inklusif harus dapat mengkomodasi atau melayani siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan perbedaan kebutuhannya”.

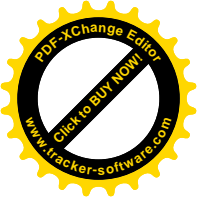
Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus memiliki siswa berkebutuhan khusus, memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusif, penuntasan wajib belajar maupun terhadap komite sekolah, memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, yang didukung dengan adanya fasilitas dan sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak (Asih, 2011: 76). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga harus menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Berbagai metode, atau strategi belajar sangat dimungkinkan dikembangkan pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, untuk menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan fleksibel. Lestaringrum (2017: 58) dalam pendidikan inklusif kurikulum dituntut



untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak demi pengembangan potensi kemanusiaanya. Mastuti (2014) menunjukkan bahwa kesiapan perencanaan program pendidikan inklusif dilakukan seperti program pembelajaran pada pendidikan dasar dengan berpedoman pada kurikulum yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas inklusif dilaksanakan secara heterogen sehingga tidak ada perbedaan dengan kelas reguler pada umumnya.

Sekolah inklusif merupakan sekolah yang memberikan kesempatan sama kepada siswa reguler (normal) dengan siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dalam satu kelas. Karakteristik siswa dalam kelas inklusif diantaranya keragaman dalam latar belakang, kemampuan, abilitas dan kapasitas. Melalui kegiatan pembelajaran, pelayanan pendidikan diberikan secara bersamaan sehingga hubungan antar individu menjadi lebih bermakna. Menurut Kadir (2015: 14) model-model pembelajaran dalam sekolah inklusif diantaranya :

- (1) Model kelas reguler/inklusi penuh, yaitu ABK yang tidak mengalami gangguan intelektual signifikan dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa.
- (2) Model *Cluster*, yaitu ABK dikelompokkan tersendiri.
- (3) Model *Pull Out*, yaitu ABK dipindahkan ke ruang khusus untuk mendapatkan pelajaran tertentu dan didampingi guru khusus.
- (4) Model *Cluster and Pull Out*, yaitu kombinasi antara model *Cluster* and *Pull Out*.
- (5) Model kelas khusus, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus bagi ABK, namun untuk beberapa kegiatan pembelajaran tertentu semua peserta didik digabung dengan kelas reguler.



(6) Model khusus penuh, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus ABK.

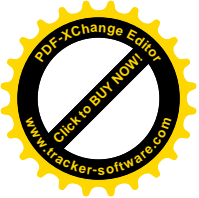
2.1.2.1 Pengertian pendidikan inklusif

Dalam arti yang luas pendidikan inklusif adalah suatu ideologis atau filosofis penyelenggara pendidikan dimana semua anak dari berbagai latar belakang dan kondisi dapat mengikuti pendidikan dalam suatu lingkungan pendidikan yang disesuaikan dan dapat mengakomodir kebutuhan semua siswa (Koswara, 2013: 129). Pendidikan inklusif merupakan perkembangan lebih lanjut dari program mainstreaming yang sudah beberapa dekade ini diterapkan secara luas oleh para pendidik di berbagai negara untuk anak-anak berkebutuhan khusus, meskipun orientasi dan implementasinya berbeda (Asih, 2011: 74). Sharon Rustemier (2002) dalam Garnida (2015: 49) mendefinisikan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang dapat diikuti oleh semua orang dengan dan tanpa keterbatasan dan dapat berlangsung di setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi.

2.1.2.2 Tujuan pendidikan inklusif

Kustawan (2012: 9) mengemukakan tujuan utama pendidikan inklusif adalah agar semua anak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua anak. Pendidikan inklusif bertujuan:

- (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki



potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

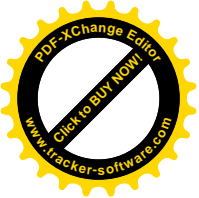
2.1.2.3 Fungsi pendidikan inklusif

Fungsi pendidikan inklusif harus sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Florian (2008: 34) dalam Ilahi (2013: 50) menyatakan, “Pendidikan inklusif lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya disediakan bagi siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa”. Fungsi pendidikan inklusif menurut Kustawan (2012: 9) adalah:

- (1) Menjamin semua peserta didik mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan bermutu di berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

2.1.2.4 Manfaat pendidikan inklusif

Kustawan (2012: 10) menyatakan, “Pendidikan inklusif bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik pada umumnya, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah. Semua pihak diharapkan memiliki sikap yang positif, ramah dan tidak



mendiskriminasi”. Ada 6 manfaat pendidikan inklusif menurut Kustawan (2012)

diantaranya :

(1) Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik

1) Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus

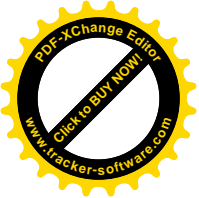
Manfaatnya adalah peserta didik berkebutuhan khusus memiliki rasa percaya diri dan memiliki kesempatan menyesuaikan diri serta memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan yang nyata di lingkungan pada umumnya.

2) Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik pada umumnya

Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik pada umumnya adalah dapat belajar mengenai keterbatasan dan kelebihan tertentu pada teman-temannya serta keunikannya. Peserta didik pada umumnya akan tumbuh rasa kepedulian, karakter kerjasama dan saling menghargai terhadap keterbatasan dan kelebihan peserta didik berkebutuhan khusus.

(2) Manfaat pendidikan inklusif bagi guru

Melalui pemahaman konsep pendidikan inkusif, guru dapat menambah pengetahuan mengenai keunikan siswa, guru akan lebih memvariasikan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswanya dan memberikan pelayanan kebutuhan yang memudahkan siswa untuk dapat mengasah potensinya sehingga siswa berkebutuhan khusus dapat berkembang sesuai degan porsinya.



(3) Manfaat pendidikan inklusif bagi orang tua

Orang tua merasa senang ketika anaknya dapat bersosialisasi dengan baik tanpa ada diskriminasi dan akan lebih memahami cara memotivasi peningkatan belajar anaknya yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya.

(4) Manfaat pendidikan inklusif bagi pemerintah dan pemerintah daerah

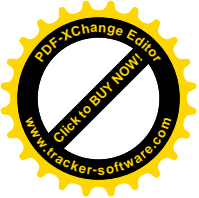
Manfaat pendidikan inklusif bagi pemerintah dan pemerintah daerah adalah kebijakan pendidikan terlaksana berlandaskan pada azas demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi karena dapat melaksanakan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta kebijakan-kebijakan sebagai manifestasi keinginan atau harapan warga negara Indonesia, sehingga menimbulkan nilai tambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam bidang pendidikan.

(5) Manfaat pendidikan inklusif bagi masyarakat

Manfaat pendidikan inklusif bagi masyarakat adalah dapat memaksimalkan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat akan lebih sadar bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan seperti peserta didik pada umumnya.

(6) Manfaat pendidikan inklusif bagi sekolah

Pencitraan sekolah akan meningkat, sekolah lebih terbuka, ramah dan tidak diskriminasi. Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif bagi semua peserta didik. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik (*children centre*) sehingga lingkungan sekolah dan kelas ramah terhadap peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran menjunjung tinggi keberagaman



dan gaya belajar didasarkan pada kegiatan yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

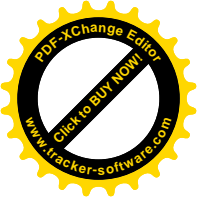
2.1.2.5 Landasan filosofis pendidikan inklusif

Garnida (2015: 44) secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung garuda yang berarti Bhineka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Republik Indonesia (NKRI).
- (2) Pandangan agama (khususnya dalam agama islam) mengenai fenomena pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua karakteristik berkebutuhan khusus antara lain ditegaskan bahwa :
 - 1) Manusia dilahirkan dalam keadaan suci.
 - 2) Kemuliaan seseorang dihadapan Tuhan bukan karena fisik tetapi taqwanya.
 - 3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri.
 - 4) Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusif).
- (3) Pandangan universal hak azasi manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan.

2.1.2.6 Landasan operasional pendidikan inklusif

Pada hakikatnya pendidikan inklusif sudah berlangsung lama, kemunculan pendidikan inklusif di Indonesia terjadi ketika sistem segregasi kurang mampu



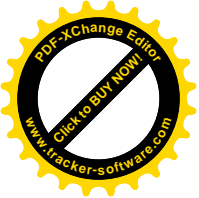
memberikan perubahan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas (Ilahi, 2012: 30). Landasan yuridis dan empiris penyelenggaraan pendidikan inklusif menurut Asih (2011: 75) adalah :

- (1) UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 5 ayat (1) dan (2).
- (2) UUD 1945 pasal 31 ayat (1), (2), dan (3).
- (3) Permendikbud nomor 22 dan 23 tahun 2006.
- (4) Deklarasi hak asasi manusia tahun 1948.
- (5) Konvensi dunia tentang pendidikan untuk semua tahun 1990.
- (6) Revolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan.
- (7) Pernyataan Salamanca (1994) tentang pendidikan inklusif komitmen Dakar (2000) mengenai pendidikan untuk semua.
- (8) Deklarasi Bandung tahun 2004 dan symposium internasional pendidikan inklusif pada tahun 2006 di Bukittinggi.

2.1.2.7 Bentuk dukungan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

Bentuk dukungan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif menurut Koswara (2013: 131) dapat dilakukan dalam bentuk:

- (1) Kebijakan dari pihak sekolah dan pejabat dinas pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah reguler dalam setting pendidikan inklusif.
- (2) Berdasarkan regulasi hukum yang ditetapkan pemerintah, sekolah menetapkan kebijakan operasional dalam bentuk keputusan kepala sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, mulai dari aturan penerimaan



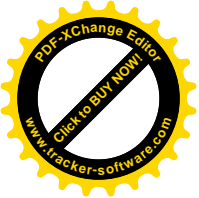
peserta didik baru, pengembangan kurikulum dalam dokumen I KTSP, program dan rencana pembelajaran, penilaian dan evaluasi dan sistem pelaporan pendidikan.

- (3) Menyiapkan sumber daya manusia, mulai dari guru, guru pembimbing khusus, dan tenaga ahli lainnya yang terkait.
- (4) Menyediakan sarana prasarana pendukung pendidikan inklusif, seperti menyediakan ruangan sumber (*resource room*) dan pusat sumber (*resource center*) sebagai sistem yang berada di luar sekolah. *Resource center* biasanya berada di SLB terdekat.
- (5) Membangun komunitas sosial, untuk meningkatkan pemahaman berbagai pihak terkait terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.

2.1.2.8 Syarat menjadi sekolah inklusif

Sesuai dengan Permendiknas No.70 tahun 2009 maka satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Telah memiliki ijin operasional dari pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel
- (3) Tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar.
- (4) Tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik.
- (5) Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar.

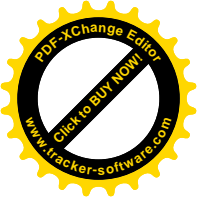


- (6) Mendapat rekomendasi penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari pemerintah provinsi.

Kegiatan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu disesuaikan dengan regulasi yang telah ditetapkan. “Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan” (Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Bab II).

2.1.3 Anak Berkebutuhan Khusus

Istilah anak berkebutuhan khusus termasuk istilah yang baru yang digunakan untuk menunjuk anak dengan kondisi khusus atau berkelainan, hal ini sejalan dengan perkembangan pengakuan hak azasi anak berkebutuhan khusus yang diatur melalui Undang-undang *Education of All Handicapped Children Act* (PL 94-142) di Amerika Serikat sehingga tanggal 3 Desember merupakan hari khusus yang ditetapkan PBB sebagai hari penyandang cacat sedunia. Istilah cacat mengandung makna yang negatif sehingga pada kegiatan Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, diputuskan untuk menghapus istilah penyandang cacat dan diganti dengan istilah yang lebih sopan yaitu penyandang disabilitas. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Bab 1 Pasal 1 menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.



Tabel 2.1 Estimasi Prevalensi Disabilitas berdasarkan Estimasi Global Burden of Disease Tahun 2004

JenisKelamin/Umur	Dunia	Negara Berpenghasilan Tinggi	Persentase Negara Berpenghasilan Menengah dan Rendah, Regional WHO					
			Afrika	Amerika	Asia Tenggara	Europa	Mediterania Timur	Pasifik Barat
Disabilitas Parah								
Laki-laki								
0-14 tahun	0,7	0,4	1,2	0,7	0,7	0,9	0,9	0,5
15-59 tahun	2,6	2,2	3,3	2,6	2,7	2,8	2,9	2,4
>60 tahun	9,8	7,9	15,7	9,2	11,9	7,3	11,8	9,8
Perempuan								
0-14 tahun	0,7	0,4	1,2	0,6	0,7	0,8	0,8	0,5
15-59 tahun	2,8	2,5	3,3	2,6	3,1	2,7	3,0	2,4
>60 tahun	10,5	9,0	17,9	9,2	13,2	7,2	13,0	10,3
Laki-laki dan Perempuan								
0-14 tahun	0,7	0,4	1,2	0,6	0,7	0,8	0,9	0,5
15-59 tahun	2,7	2,3	3,3	2,6	2,9	2,7	3,0	2,4
>60 tahun	10,2	8,5	16,9	9,2	12,6	7,2	12,4	10,0
≥15 tahun	3,8	3,8	4,5	3,4	4,0	3,6	3,9	3,4
Semua Umur	2,9	3,2	3,1	2,6	2,9	3,0	2,8	2,7
Disabilitas Sedang dan Parah								
Laki-laki								
0-14 tahun	5,2	2,9	6,4	4,6	5,3	4,4	5,3	5,4
15-59 tahun	14,2	12,3	16,4	14,3	14,8	14,9	13,7	14,0
>60 tahun	45,9	36,1	52,1	45,1	57,5	41,9	53,1	46,4
Perempuan								
0-14 tahun	5,0	2,8	6,5	4,3	5,2	4,0	5,2	5,2
15-59 tahun	15,7	12,6	21,6	14,9	18,0	13,7	17,3	13,3
>60 tahun	46,3	37,4	54,3	43,6	60,1	41,1	54,4	47,0
Laki-laki dan Perempuan								
0-14 tahun	5,1	2,8	6,4	4,5	5,2	4,2	5,2	5,3
15-59 tahun	14,9	12,4	19,1	14,6	16,3	14,3	15,5	13,7
>60 tahun	46,1	36,8	53,3	44,3	58,8	41,4	53,7	46,7
≥15 tahun	19,4	18,3	22,0	18,3	21,1	19,5	19,1	18,1
Semua Umur	15,3	15,4	15,3	14,1	16,0	16,4	14,0	15,0

Catatan: Negara berpendapatan tinggi adalah negara dengan GNP perkapita tahun 2004 sebesar US\$ 10.000 atau lebih, semua estimasi Bank Dunia. Negara berpendapatan rendah dan menengah adalah negara-negara anggota WHO Asia Selatan Rupa tahun 2004 yang dari US\$ 10.000 (sumber: Bank Dunia). Disabilitas parah terdiri dari kelas II dan III, disabilitas sedang dan parah terdiri dari kelas I dan II.

Sumber: World Report on Disability, WHO 2011

Sumber : Pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI tahun 2014

Istilah yang digunakan saat ini dan berkembang secara luas adalah difabel (*diference ability*), penggunaan istilah anak berkebutuhan khusus membawa konsekuensi cara pandang yang berbeda dengan istilah sebelumnya. Jika pada istilah luar biasa menitik beratkan pada kondisi fisik, mental, dan emosional anak maka pada anak berkebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi sesuai dengan potensinya (Asih, 2011: 2). Istilah dan konsep anak berkebutuhan khusus berkembang seiring dengan munculnya paradigma baru pendidikan inklusif (Ilahi, 2013: 137). Istilah anak berkebutuhan khusus bukan berarti hendak menggantikan anak penyandang cacat atau anak luar biasa, melainkan memiliki pandangan yang lebih luas dan positif bagi anak dengan keberagaman yang berbeda (Sunanto, 2009 dalam Ilahi, 2013: 137).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih mendalam. Kebutuhan mungkin

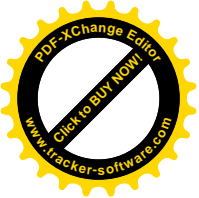


disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Disebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan perbedaan dengan anak normal pada umumnya.

2.1.3.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus menurut Geniofam dalam Asih (2011: 2) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Undang-undang RI No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus menggunakan istilah lama yaitu anak atau peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan mental disebut anak luar biasa. Pada kamus bahasa Indonesia, kata abnormal diartikan tidak sesuai dengan keadaan yang biasa, mempunyai kelainan dan tidak normal. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, anak yang memiliki kelainan fisik dan mental disebut dengan istilah anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus juga dapat dimaknai sebagai anak yang karena kondisi fisik, mental, sosial dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa Bab I Pasal I Ayat (5) “Siswa adalah peserta didik pada Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Luar Biasa”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah anak berkebutuhan khusus merujuk pada seseorang yang berusia



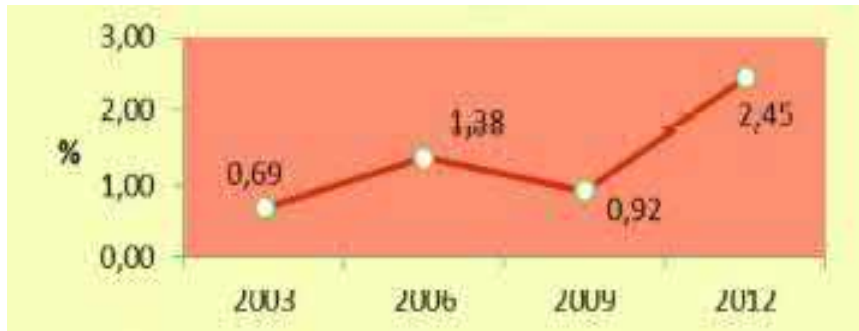
dibawah 18 tahun serta memiliki kebutuhan khusus, sedangkan siswa berkebutuhan khusus adalah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah.

2.1.3.2 Data Penyandang Disabilitas

Sulistiyadi (2014: 1) berpendapat, data yang dimiliki PBB pada tahun 2010 terdapat 12% penyandang cacat dari jumlah populasi penduduk di dunia atau sekitas 650 juta jiwa adalah penyandang cacat dimana hampir 25% dari jumlah tersebut atau sekitar 163 juta orang adalah anak usia sekolah. Sahidi (2016: 1) berpendapat bahwa di Indonesia berdasarkan pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas mencapai sekitar 2% dari total 244.775.796 jiwa penduduk Indonesia saat itu atau sebesar 3.654.356 jiwa dan terbagi dalam beberapa karakteristik hambatan yang dialaminya.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, dimana 80 % dari jumlah penyandang disabilitas di dunia berada di kalangan negara-negara berkembang. Dari total penyandang disabilitas di dunia, sepertiga dari jumlahnya adalah anak-anak di usia sekolah. Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (7) menjelaskan mengenai pengertian anak penyandang disabilitas yaitu sebagai anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik motorik yang menetap dan dalam waktu yang lama sehingga mengalami kesulitan untuk dapat berperan secara optimal. Data susenas kemenkes RI menunjukkan peningkatan yang

signifikan terjadi pada presentase jumlah penduduk penyandang disabilitas dari tahun ke tahun.



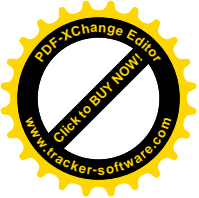
Gambar 2.1 Presentase Penduduk Penyandang Disabilitas berdasarkan Data Susenas 2003, 2006, dan 2012

Sumber : Data BPS dalam Pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI tahun 2014

2.1.3.3 Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus

Geniofam dalam Asih (2011: 11) menjelaskan jenis anak berkebutuhan khusus diantaranya tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, autis dan *down syndrome*. Sementara jenis anak berkebutuhan khusus menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa adalah :

- (1) Tunanetra;
- (2) Tunarungu;
- (3) Tunadaksa;
- (4) Anak yang berbakat/memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa;
- (5) Tunagrahita;
- (6) Anak yang lamban belajar (*slow learner*);
- (7) Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik;



- (8) Tunalaras;
- (9) Tunawicara;
- (10) Autisme;
- (11) ADHD;
- (12) *Cerebral Palsy* (CP);
- (13) Anak korban narkoba serta HIV/AIDS.

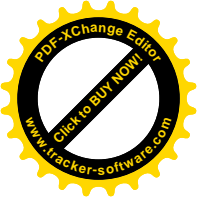
2.1.3.4 Klasifikasi anak berkebutuhan khusus

Menurut Asih (2011: 15) Secara garis besar anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan dalam :

- (1) Anak-anak berkebutuhan khusus berlainan fisik.
- (2) Anak-anak berkebutuhan khusus berlainan mental emosional.
- (3) Anak-anak berkebutuhan khusus berkesulitan.

Alimin dalam Asih (2011) membedakan anak berkebutuhan khusus dalam dua kelompok besar yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara dan bersifat tetap. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer) adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal misalnya anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma dan sebagainya. Lebih lanjut, Alimin menjelaskan bahwa anak yang mengalami kecacatan dalam fungsi organ tubuh dan indera masuk dalam taraf berat atau permanen.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa mengemukakan klasifikasi anak berkebutuhan khusus sebagai berikut :

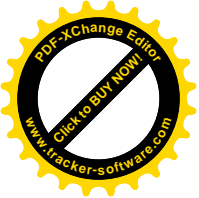


(1) Tunarungu

Winarsih (2007: 22) dalam Asih (2011) mengemukakan bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Suharmini (2009: 35) dalam Asih (2011) mengemukakan tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara, atau rangsang lain melalui pendengaran. Klasifikasi menurut Delphie (2009: 104) membagi beberapa kategori tunarungu berdasarkan atas ambang batas kemampuan mendengar terdiri atas ringan (25-54 dB), sedang (55-69 dB), berat (70-89), dan sangat berat (90 dB keatas).

(2) Tunadaksa

Tunadaksa adalah suatu kondisi kurang berfungsinya organ secara optimal sebagai akibat dari kecelakaan, atau luka dan secara signifikan mengalami penurunan. Anak tunadaksa mengalami hambatan dan rintangan dalam mobilitas normal atau disebut *handicapped children*. Sedangkan, secara definitif pengertian tunadaksa juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri (Somantri, 2012: 121). Dengan demikian dalam memberikan layanan disekolah memerlukan modifikasi dan adaptasi yang diklasifikasikan dalam tiga kategori umum, yaitu kerusakan saraf, kerusakan tulang, dan anak dengan gangguan kesehatan lainnya.

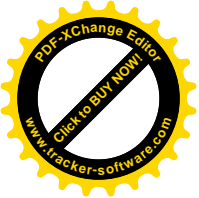


(3) Tunagrahita

Anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, mereka memiliki IQ diatas anak autisme dan dibawah anak lamban belajar sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya seperti perkembangan kognitif dan sosial dalam kelas belajarnya. Jamaris & Mulyono (2006) dalam Ilahi (2013: 140) anak tunagrahita merupakan jenis anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara dan menetap.

Astati dan Mulyati (2010: 10) dalam Asih (2011) mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan anak tunagrahita yaitu: pertama, berkaitan dengan fungsi intelektual atau IQ, anak tunagrahita memiliki IQ paling tinggi 70 berada dibawah rata-rata anak normal yang memiliki IQ 100 dan dibuktikan dengan hasil tes IQ oleh psikolog. Kedua, mereka memiliki kekurangan dalam tingkah laku adaptif sehingga ia hanya mampu bersosialisai, berinteraksi, bermain dan melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh anak yang berada dibawah usianya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tunagrahita mengacu pada fungsi intelek umum yang berada dibawah rata-rata yang menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi seperti kesulitan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan usianya dan berlangsung sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun.



(4) Tunalaras

Tunalaras atau *emotionally handicapped* atau *behavioral disorder* adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Sebab-sebab anak menjadi tunalaras secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Ibrahim 2005: 48) dalam Asih (2011) diantaranya :

1) Faktor Psikologis

Gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologis yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang.

2) Faktor Psikososial

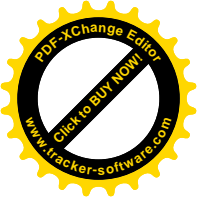
Gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustrasi atau perkembangan dan lingkungan sosial yang kurang baik.

3) Faktor Fisiologis

Gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ tubuh yang kurang berfungsi secara optimal sehingga berakibat pada gerak refleks perilaku yang ditampakkan seperti pada gangguan syaraf dan motorik.

(5) Tunawicara

Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (tunarungu tunawicara), pada umumnya mereka mengalami hambatan pendengaran dan kesulitan melakukan komunikasi secara lisan dengan orang lain. Amni (1979: 23) dalam Asih (2011) mengatakan bahwa anak tunawicara dapat terjadi karena tiga faktor. Pertama, faktor ketika sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan yaitu

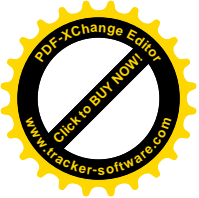


karena faktor keturunan dan kekurangan oksigen dalam janin. Kedua, ketika proses kelahiran yang tidak normal atau prematur dan terakhir, bisa disebabkan karena infeksi yang terjadi pada bayi dan radang pada selaput otak.

(6) Kesulitan belajar

Berkesulitan belajar atau lamban belajar merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi (prestasi) yang telah ditentukan dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Siswa yang lamban belajar (*slow learner*) adalah sekelompok siswa di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Pada umumnya mereka mempunyai kecerdasan dibawah rata-rata. Siswa yang mengalami lamban belajar berbeda dengan siswa yang prestasi belajarnya rendah (*underachiever*). Siswa lamban belajar memiliki perkembangan atau prestasi belajar yang lebih rendah dari rata-rata dan kemampuan kecerdasan yang lebih rendah dibawah rata-rata. Sedangkan siswa berprestasi belajar rendah memiliki perkembangan atau prestasi belajar yang lebih rendah dari rata-rata namun kemampuan kecerdasannya normal atau mungkin lebih tinggi. Ciri-ciri yang dapat diamati pada anak lamban belajar menurut Garnida (2015: 16) yaitu :

- 1) Rata-rata prestasi belajarnya rendah (kurang dari 6).
- 2) Menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan dengan teman-temannya.
- 3) Daya tangkap terhadap pembelajaran lambat.
- 4) Pernah tidak naik kelas.



(7) Tunanetra

Tunanetra adalah anak yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang baik, walaupun dengan memakai kacamata, atau yang daerah penglihatannya sempit sedemikian kecil sehingga yang terbesar jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat (Daniel P Hallahan dalam Asih, 2011). Berdasarkan tingkatannya, tunanetra diklasifikasikan sebagai berikut :

1) *Low vision*

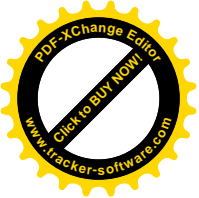
Penyandang tunanetra tingkat low vision hanya memiliki ketajaman penglihatan 6/20 meter – 6/60 meter dari penglihatan normal yang seharusnya 20/20 meter – 6/6 meter. Namun penderita ini masih memiliki kemungkinan untuk melihat dengan alat bantu khusus.

2) *The Blind*

The blind adalah kelainan penglihatan kategori berat. Penyandang tunanetra kategori ini hanya memiliki tingkat ketajaman penglihatan 6/60 meter atau kurang. Dalam kategori ini penderita masih memiliki dua kemungkinan, yaitu ada kalanya masih dapat melihat gerakan-gerakan tangan atau hanya dapat membedakan gelap dan terang. Sedangkan tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan visus 0 sama sekali sudah tidak dapat melihat.

Kirk (1989) dalam Asih (2011: 16) mengklasifikasikan penderita tunanetra berdasarkan kemampuan penyesuaiannya dalam pemberian layanan pendidikan khusus yang diperlukan sebagai berikut :

1) Kemampuan melihat sedang (*moderate visual disability*)



Pada taraf ini penyandang masih dapat melaksanakan tugas-tugas visual yang dilakukan orang normal dengan alat bantu khusus serta bantuan cahaya yang cukup.

2) Ketidakmampuan melihat taraf berat (*severe visual disability*)

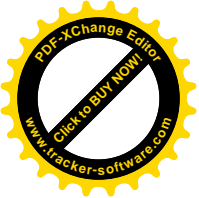
Pada taraf ini, penderita memiliki penglihatan yang kurang baik atau kurang akurat meskipun dengan menggunakan alat bantu visual dan modifikasi sehingga mereka membutuhkan banyak tenaga ketika mengerjakan tugas-tugas visualnya.

3) Ketidakmampuan melihat taraf sangat berat (*profound visual disability*)

Pada taraf ini penderita mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugas visual dan tidak dapat melakukan tugas visual yang lebih detail seperti membaca dan menulis. Sehingga mereka mengandalkan indera perabaan dan pendengaran dalam menempuh pendidikan.

2.1.4 Anak Berkesulitan Belajar

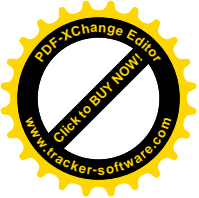
Public Law (PL) dalam Koswara (2013: 7) menyatakan bahwa kesulitan belajar spesifik (*Specific learning disability*) adalah gangguan satu atau lebih dari proses psikologis dasar, yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran dan tulisan. Anak berkesulitan belajar mempunyai hambatan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar secara spesifik (proses mengacu pada prasyarat kemampuan seperti daya ingatan, persepsi pendengaran, persepsi visual, dan bahasa ucapan), meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa secara tulisan atau lisan, kemampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, pengucapan kata, atau penghitungan yang berkaitan dengan matematika (Delphie, 2009: 3). Istilah lamban belajar (*slow learner*) seringkali dipakai untuk seorang



anak yang tidak dapat belajar dengan baik di sekolah. Skor IQ yang rendah seringkali dianggap telah cukup untuk menjelaskan kurang berkembangnya seorang anak dalam hal tersebut. Jenis anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan layanan pendidikan inklusif yang secara konsisten sehingga mengatasi segala hambatan belajar dan perkembangan jiwanya.

2.1.4.1 Pengertian anak berkesulitan belajar

Anak berkesulitan belajar yaitu anak usia diatas 6 tahun yang memiliki kesulitan dalam memahami pembelajaran di bidang akademik secara spesifik seperti kesulitan berhitung (*dyscalculia*), kesulitan membaca (*disleksia*), kesulitan menulis (*disgraphia*), kesulitan berbahasa (*disphasia*), dan kesulitan terampil (*dispraksia*) (Asih 2011: 28). Pandey dan Kurian (2016) mendefinisikan “*Slow learners are understudies with marginal knowledge and they frequently battle to adapt to the conventional scholastic request of the customary classroom*”. *Slow learner* adalah mereka yang memiliki pretasi belajar rendah (di bawah rata-rata) anak pada umumnya pada salah satu atau area akademik, namun bukan tergolong anak terbelakang mental. Skor tes IQ nya menunjukkan skor 70-90. Toto (2005: 23) dalam Triani dan Amir (2016: 3) menyatakan, “Siswa lamban belajar (*slow learner*) ialah siswa yang inteligensinya berada pada taraf perbatasan (borderline) dengan IQ 70-85 berdasarkan tes inteligensi baku”. Beberapa model inklusif bagi anak berkebutuhan khusus seperti the *corvalis*, *montana*, dan *project* oleh Sumekar dalam Novembli (2015: 11) layanan tersebut diangkat sebagai model program yang meliputi berbagai komponen seperti tutorial, pembelajaran kooperatif dan tutor sebaya. Strategi tersebut dapat mengatasi hambatan bagi



siswa berkesulitan belajar sehingga dapat mengembangkan strategi pembelajaran akademis, motivasi kemampuan sosial dan pengarahan diri (*self-direction*).

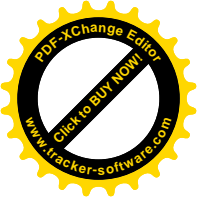
2.1.4.2 Klasifikasi anak berkesulitan belajar

(1) Kesulitan belajar perkembangan

Pengelompokan kesulitan belajar pada anak usia dibawah 5 tahun atau balita adalah kesulitan belajar perkembangan, hal ini dikarenakan balita belum belajar secara akademis (Asih, 2011: 28). Anak yang mengalami kesulitan dalam kelompok ini, meliputi gangguan motorik dan persepsi yang biasanya ditunjukkan dengan kekurangmampuan anak dalam menulis, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi yang ditunjukkan dengan kesulitan bahasa/berbicara dan membaca serta kesulitan dalam penyesuaian sosial, ditunjukkan dengan gagalnya anak beradaptasi dengan lingkungan kelas dan sekolahnya dan anak seringkali menunjukkan perilaku hiperaktif atau hipoaktif (Koswara, 2013: 13).

(2) Kesulitan belajar akademik

Gejala kesulitan belajar akademik ini terjadi pada anak usia 6 tahun yang disebabkan karena kesulitan memahami pembelajaran di sekolah. Anak-anak ini mengalami kesulitan bidang akademik di sekolah yang sangat spesifik (Asih 2011: 28). Ketidakberhasilan anak terjadi karena dalam pembelajaran sebelumnya anak tidak atau belum menguasai keterampilan membaca, menulis dan berhitung (Koswara, 2013: 13). Setiap anak akan dihadapkan pada sejumlah prasyarat untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk dapat membaca dengan baik seorang anak harus mampu melakukan deskriminasi visual, yaitu membedakan



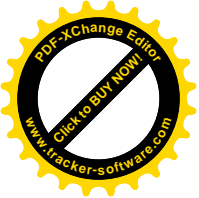
bentuk masing-masing huruf, dan membedakan bunyi masing-masing huruf serta dilatih kemampuannya dalam memusatkan perhatian (Koswara 2013: 13).

2.1.4.3 Faktor penyebab anak lamban belajar

Banyak faktor yang mempengaruhi anak menjadi lamban belajar. Kroesbergen & Luit (2003: 97) berpendapat bahwa potensi penyebab kesulitan sangat beragam dan sebagian dapat diketahui dari karakteristik anak seperti fungsi intelektual, motivasi, pemecahan masalah keterampilan, keterampilan memori, strategi akuisisi dan aplikasi serta kosa kata. Beberapa faktor penyebab anak lamban belajar menurut Triani dan Amir (2016: 4) adalah:

(1) Faktor prenatal (sebelum lahir) dan genetik

Perkembangan seorang anak dimulai sejak konsepsi atau pembuahan. Seluruh bawaan biologis seorang anak berasal dari kedua orang tuanya. Terjadinya kelainan kromosom dapat menyebabkan terjadinya pula kelainan yang berhubungan dengan fisik maupun fungsi-fungsi kecerdasan. Selain dari kromosom, anak lamban belajar juga dapat disebabkan karena gangguan biokimia dalam tubuh, seperti *galactosemia* dan *phenylketonuria*. *Galactosemia* adalah suatu gangguan biokimia dimana terdapat *defisiensi enzim* yang dibutuhkan untuk metabolisme galaktosa yang layak. Sedangkan *phenylketonuria* adalah suatu gangguan metabolisme genetik, dimana oksidasi yang tidak lengkap dari asam amino yang menyebabkan kerusakan pada otak. Dalam beberapa kasus, kondisi jantung ibu yang kurang baik serta kelahiran prematur juga disinyalir menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan belajar.



(2) Faktor biologis non keturunan

Beberapa faktor eksternal yang menjadi penyebab anak mengalami lamban belajar adalah obat-obatan, keadaan gizi ibu yang buruk saat hamil, dan radiasi sinar X. Radiasi sinar X rawan terjadi pada saat usia kehamilan muda kemudian berkurang resikonya pada hamil tua.

(3) Faktor natal (saat proses kelahiran)

Kondisi kekurangan oksigen saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama atau bermasalah dapat menyebabkan transfer oksigen ke otak bayi menjadi terhambat. Sehingga sebaiknya hal seperti ini diantisipasi dengan baik.

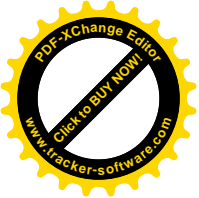
(4) Faktor postnatal (sesudah lahir) dan lingkungan

Malnutrisi dan trauma fisik akibat jatuh atau kecelakaan, trauma pada otak atau beberapa penyakit seperti meningitis dan encephalis juga mempengaruhi seorang anak dapat mengalami lamban belajar. Selain itu, stimulasi dalam lingkungan yang salah dapat menyebabkan anak tidak berkembang secara optimal.

2.1.4.4 Karakteristik anak lamban belajar

(1) Inteligensi

Dari segi inteligensi, anak-anak lamban belajar berada pada kisaran dibawah rata-rata yaitu 70-90 berdasarkan skala WISC. Anak dengan IQ 70-90



biasanya mengalami masalah hampir pada semua pelajaran terutama yang berkenaan dengan hafalan dan pemahaman.

(2) Bahasa

Anak lamban belajar mengalami masalah dalam berkomunikasi. Anak-anak ini mengalami kesulitan baik dalam bahasa ekspresif atau menyampaikan ide atau gagasan maupun dalam memahami percakapan orang lain. Sehingga berpengaruh pada kemampuan persepsi anak.

(3) Emosi

Anak *slow learner* memiliki emosi yang kurang stabil, mereka mudah marah dan meledak-ledak serta sensitif dan jika ada hal yang membuatnya tertekan mereka cepat mengalami patah semangat.

(4) Sosial

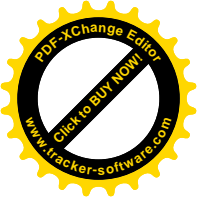
Anak-anak lamban belajar (*slow learner*) dalam bersosialisasi biasanya kurang baik. Mereka lebih sering menjadi pemain pasif bahkan menarik diri.

(5) Moral

Moral seseorang akan berkembang seiring dengan kematangan kognitifnya. Anak-anak lamban belajar tahu aturan yang berlaku tetapi mereka tidak paham untuk apa aturan itu dibuat. Oleh karena itu sebaiknya anak-anak lamban belajar harus sering diingatkan.

2.1.5 Anak Tunadaksa

Istilah anak berkebutuhan khusus tunadaksa memiliki arti luas yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan normal anak, kondisi apa saja yang menyimpang, dan kondisi apa saja yang mempunyai pengaruh negatif pada



pertumbuhan dan perkembangan sehingga berdampak pada kondisi psikologis anak serta perasaan yang dialaminya. Penderita tunadaksa ada yang normal dan adapula yang mengalami gangguan pada otaknya (Delphie, 2009: 26).

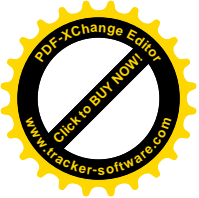
2.1.5.1 Pengertian anak tunadaksa

Anak tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, *orthopedically handicapped*, dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Menurut Karyana dan Widati (2013: 37) berpendapat bahwa tunadaksa adalah anak yang mengalami hambatan disebabkan karena anggota tubuh yang kurang sempurna sehingga menghambat dalam gerak motoriknya dan bukan cacat inderanya. Ditinjau dari sistem kelainannya, anak tunadaksa dapat dibedakan atas kelainan dalam sistem serebral dan kelainan dalam sistem otot dan rangka.

Menurut Garnida (2015: 10) kelainan pada sistem serebral berupa *celebral palsy* yang menunjukkan kelainan gerak, sikap, bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris karena adanya kerusakan pada masa perkembangan otak. Sedangkan peristilahan dalam kelumpuhan dibagi menurut kelumpuhannya. Kelumpuhan sebelah badan disebut *hemiparalise*, kelumpuhan kedua anggota gerak bawah disebut *paraparalise*. Kelumpuhan dibedakan atas *tipe spinal, bulbar, bulbospinal*, dan *encephalitis*.

2.1.5.2 Klasifikasi anak tunadaksa

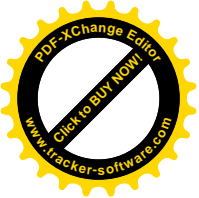
Secara umum dikenal dua macam anak tunadaksa. Pertama, anak tunadaksa yang mengalami hambatan dalam organ rangka dan gerak atau polio. Mereka tidak mengalami hambatan perkembangan kecerdasan sehingga mereka



dapat mengikuti program sekolah biasa. Kedua, anak tunadaksa yang disebabkan oleh gangguan *neurologis*. Anak tunadaksa kelompok ini mengalami gangguan gerak dan kebanyakan dari mereka mengalami gangguan kecerdasan dan sering disebut *neurology handicapped* atau secara khusus mereka disebut penyandang *celebral palsy* sehingga memerlukan layanan pendidikan yang berbeda dan lebih intensif melalui sekolah luar biasa.

Golongan anak tunadaksa *orthopedically handicapped* tetap dapat belajar bersama anak normal lainnya. Penggolongan anak tunadaksa *orthopedically handicapped* menurut Karyana dan Widati (2013: 36) diantaranya adalah *Poliomyelitis* merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menetap serta dapat dilihat dari sel-sel motorik yang rusak; *Muscle Dystrophy* menyebabkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang rata-rata disebabkan karena faktor keturunan; *Spina Bifida* merupakan jenis kelainan pada tulang belakang seperti pada penderita *hydrocephalus* yang biasanya disertai dengan gejala ketunadaksaan.

Golongan anak tunadaksa *celebral palsy* diklasifikasikan menurut derajat perkembangan otak (Garnida, 2015: 10) yaitu *Celebral palsy* menurut derajat kecacatannya diantaranya adalah *celebral palsy* ringan, sedang dan berat. Klasifikasi menurut fisiologi kelainan gerak diantaranya adalah *spastik*, *dyskensia* (*atetoid*, *rigid tremor*), dan campuran.



2.1.5.3 Karakteristik anak tunadaksa

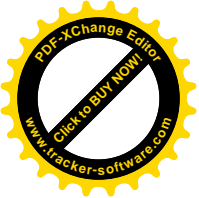
Secara umum karakteristik kelainan anak yang dikategorikan sebagai penyandang tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi anak tunadaksa ortopedi dan anak tunadaksa syaraf (Hallahan dan Kaufman, 1991 dalam Karyana dan Widati, 2013). Karakteristik anak tunadaksa diantaranya karakteristik akademik, karakteristik sosial emosional dan karakteristik fisik, penjelasannya adalah:

(1) Karakteristik akademik

Pada gejala ketunadaksaan yang dialami anak pada sistem otot dan rangka, menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan yang normal sedangkan hasil sebaliknya ditunjukkan pada anak dengan gejala tunadaksa sistem serebral yang tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat *idiocy* sampai dengan *gifted*. Hardman (1990) dalam Karyana dan Widati (2013: 38) mengemukakan, “45% anak serebral parsy mengalami keterbelakangan mental (tunadaksa), 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal dan diatas normal. Sisanya berkecerdasan sedikit dibawah rata-rata”.

(2) Karakteristik sosial/emosional

Karakteristik sosial emosional biasanya muncul karena ia merasa tidak sempurna atas dirinya sendiri sehingga menimbulkan perasaan malu dan minder serta berdampak pada perilaku yang kurang sesuai (Karyana dan Widati 2013: 38). Perilaku ini dapat memunculkan sikap *introvert* dan menjauhkan diri dari pergaulan sosial di masyarakat.



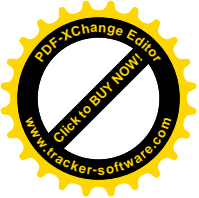
(3) Kecerdasan fisik/kesehatan

Karyana dan Widati dalam bukunya Pendidikan anak Berkebutuhan Khusus Tunadaksa mengemukakan karakteristik kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah cenderung mengalami gejala lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem serebral. Gangguan bicara disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara (kaku atau lumpuh) seperti lidah, bibir dan rahang sehingga mengganggu pembentukan artikulasi yang benar.

2.1.5.4 Faktor penyebab ketunadaksaan

Adanya keragaman jenis tunadaksa dan masing-masing kerusakan timbulnya berbeda-beda, dilihat dari saat terjadinya kerusakan otak dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir (Karyana dan Widati, 2013: 41).

- (1) Sebelum lahir (fase prenatal), kerusakan terjadi saat bayi masih dalam kandungan, kerusakan disebabkan oleh infeksi yang menyerang otak bayi, kelainan dalam kandungan seperti tali pusar yang tertekan sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf di dalam otak, bayi terkena radiasi, dan ibu mengalami trauma atau kecelakaan yang membentur perut.
- (2) Sebab-sebab pada saat kelahiran (fase natal, peri natal), hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan antara lain bayi kekurangan oksigen yang diakibatkan oleh pinggang ibu yang kecil sehingga proses kelahiran menjadi lama, kerusakan syaraf otak bayi karena pemakaian



alat bantu berupa tang pada saat proses melahirkan, dan pemakaian anstesi yang berlebihan.

(3) Sebab-sebab setelah proses kelahiran (fase post natal). Fase setelah kelahiran adalah masa mulai bayi dilahirkan sampai masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan bayi lahir adalah:

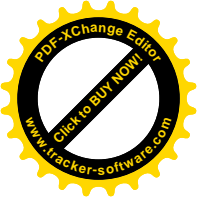
- 1) Faktor penyakit, seperti meningitis, *encephalis*, influenza, *diphtheria* dan *partusis*.
- 2) Faktor kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, terkena benturan benda keras, terjatuh dari tempat yang berbahaya bagi tubuhnya, khususnya bagian kepala yang melindungi otak.
- 3) Pertumbuhan tubuh/tulang yang tidak sempurna.

Dampak ketunadaksaan menurut Karyana dan Widati (2013: 42).

- (1) Kelainan perkembangan/intelektual.
- (2) Gangguan pendengaran.
- (3) Gangguan penglihatan.
- (4) Gangguan taktik dan kinestik.
- (5) Gangguan persepsi.
- (6) Gangguan emosi.

2.1.6 Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

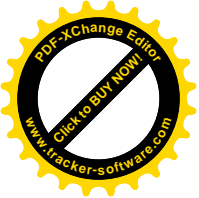
Pembelajaran berasal dari kata ajar, artinya petunjuk yang diberikan kepada orang agar diketahui. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi antara diri dan lingkungannya



dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Moh. Surya (1996: 9) dalam Karyana dan Widati (2013: 84) berpendapat bahwa pembelajaran merujuk kepada suatu kegiatan perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya. Proses pembelajaran dikelas sangat tergantung ketepatan guru dalam mendesain kelasnya. Penempatan anak di kelas diawali dari proses identifikasi dan asesmen yang telah dilakukan pada tahap awal. Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya terbatas pada kegiatan di dalam kelas saja.

Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di lembaga penyelenggara pendidikan inklusif juga perlu diasah perkembangannya agar kelak ia menjadi pribadi yang mandiri dan mampu bersosialisasi. Karakter sosial dan kerjasama antar siswa dapat dibentuk melalui kerja kelompok di kelas maupun kelompok pertemanan. Salah satu kegiatan menyenangkan yang dilakukan oleh anak di usia sekolah adalah bermain. Bermain menjadi hal yang bermanfaat bagi ABK apabila dalam kegiatan tersebut mengandung sarana edukasi yang tidak hanya berguna bagi *refreshing* tetapi juga penanaman nilai karakter.

Edukasi terkait permainan untuk ABK menurut Ariastuti dan Herawati (2016: 44) yaitu dengan melakukan kegiatan *outbond* di dalam ruangan (*indoor*) maupun diluar ruangan (*outdoor*) yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi motorik, keseimbangan, dan koordinasi gerak melalui adaptasi permainan. Yulianto (2018: 205) menyarankan agar dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah



pendekatan individu yang dilakukan melalui tiga langkah kegiatan utama yaitu asesmen, intervensi, dan evaluasi.

2.1.6.1 Sarana belajar

Secara khusus, untuk memfasilitasi anak berkesulitan belajar, sekolah minimal menyiapkan satu ruangan sumber, ruangan ini disediakan dan dirancang khusus untuk mendukung pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya berkesulitan belajar. Menurut Koswara (2013: 152) Sarana belajar anak berkebutuhan khusus *slow learner* dan tunadaksa yaitu ruang sumber dengan luas minimal 12 m² (3 x 4) dan dapat memenuhi fungsi berikut:

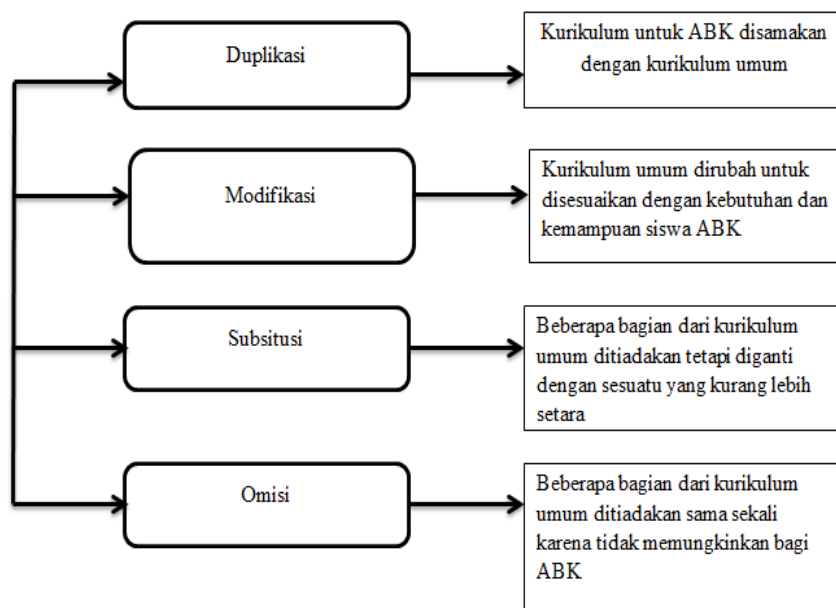
- (1) Tempat untuk memberikan layanan pembelajaran khusus.
- (2) Tempat untuk melakukan asesmen.
- (3) Sebagai kantor tempat bekerja guru pembimbing khusus.
- (4) Ruang untuk menyimpan berbagai berkas dan dokumen anak.

2.1.6.2 Model-model adaptasi kurikulum inklusif

Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen yang telah dilakukan guru dan pimpinan, sekolah dapat menetapkan model adaptasi pengembangan kurikulum yang akan digunakan di sekolah. Model ini digunakan sebagai pedoman *stakeholder* dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Model adaptasi yang tepat digunakan sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus akan memberi dampak positif bagi hasil pembelajaran di kelas inklusif.

Melalui berbagai model kurikulum, guru dan sekolah dapat melakukan adaptasi pada beberapa bagian kurikulum, dalam pengembangan program pembelajaran diperlukan strategi yang tepat dan dapat mengakomodir semua

siswa. Strategi dari sekolah, guru dan dukungan orangtua menjadi modal utama dalam adaptasi kurikulum sekolah inklusif.

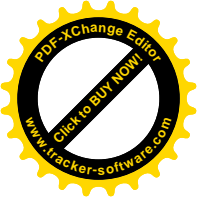


Gambar 2. Model-Model Adaptasi Kurikulum

Sumber : Koswara (2013: 153) dalam buku Pendidikan ABK anak berkesulitan belajar spesifik

2.1.6.3 Pembelajaran bagi anak *slow learner*

Menurut Triani dan Amir (2016: 21) pembelajaran bagi anak *slow learner* sama seperti yang digunakan anak pada umumnya. Penggunaan multi metode yang sesuai dengan target pembelajaran tentunya sangat dianjurkan. Hanya saja ada yang perlu di modifikasi dalam pelaksanaannya, disesuaikan dengan kebutuhan anak lamban belajar atau *slow learner*. Berbagai macam metode pembelajaran digunakan dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Triani dan Amir (2016: 22) menjabarkan metode-metode tersebut antara lain :



(1) Diskusi (*Discussion method*)

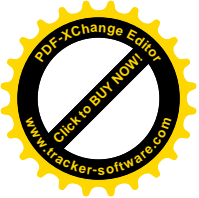
Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat simpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Karena keterbatasan kemampuan kognitif anak *slow learner* dalam pembelajaran, tidak jarang diskusi menjadi tidak hidup. Sehingga dalam pelaksanaan diskusi, guru mengkondisikan agar dalam setiap kelompok terdiri dari berbagai kemampuan anak yang heterogen.

(2) Tanya jawab

Yaitu model yang melibatkan langsung peserta didik secara aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau menjawab dan menyumbangkan idenya. Tanya jawab dilaksanakan dalam dua arah yaitu antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa.

(3) Kerja kelompok

Jika metode pembelajaran yang digunakan adalah berkelompok maka sebaiknya anak-anak lamban belajar tidak dikelompokkan dengan anak-anak yang sejenis. Disarankan anak digabung dengan anak yang memiliki kemampuan lebih dengan pendampingan guru supaya tidak terjadi kelompok minoritas. Anak-anak lamban belajar dapat ditugaskan atau bertanggungjawab pada bagian yang konkret dan mudah, sedangkan anak-anak lain dapat mengambil bagian pada komponen yang abstrak dan sulit.



(4) Bermain peran (*role playing*)

Pengalaman belajar bagi siswa *slow learner* yang diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan kerjasama, komunikasi, dan menginterpretasikan suatu kejadian.

(5) *Discovery learning*

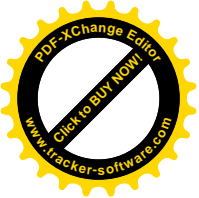
Metode ini mendorong anak untuk mencari tahu jawaban yang benar dan salah dengan usahanya sendiri. Dengan demikian, anak dapat terpacu untuk belajar. Namun, jika kurang pendampingan, metode ini akan membuat anak menjadi frustrasi. Oleh karena itu berikan materi yang sederhana sehingga anak merasa mampu melaksanakannya.

(6) Pemberian tugas

Metode pemberian tugas merupakan suatu metode pembelajaran dengan pemberian pekerjaan atau tugas kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu.

(7) Metode karyawisata

Metode karyawisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik untuk mempelajari materi tertentu dengan membawa anak ke luar kelas. Sebetulnya yang dimaksud dengan keluar kelas ini, tidak saja harus keluar sekolah dengan jarak yang jauh bahkan naik kendaraan, tetapi ketika anak keluar dari kelas, belajar di halaman sekolah pada sebagian pendapat hal tersebut sudah termasuk pada metode karyawisata. Dengan anak lamban belajar melihat langsung atau konkrit pada objek yang sedang di pelajarinya, maka pembelajaran anak akan menjadi semakin jelas dan bermakna.



(8) Metode latihan keterampilan (*Drill method*)

Siswa *slow learner* dapat memahami pembelajaran yang diberikan karena di selingi dengan kegiatan keterampilan. Selain unik, metode latihan keterampilan juga dapat menambah pengetahuan dan *soft skills* siswa mengenai cara pembuatan suatu benda baik berupa makanan maupun karya seni.

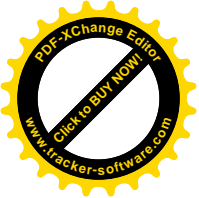
2.1.6.4 Cara memulai pembelajaran pada anak lamban belajar (*slow learner*)

Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, sebaiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Triani dan Amir (2016: 28), antara lain memulai pelajaran ketika anak sudah siap menerima materi, mengawali pembelajaran dengan apersepsi dan mengaitkan dengan konsep yang sudah dipahami anak sebelumnya, meyakinkan anak dan memotivasi bahwa ia akan berhasil, menciptakan rapport dan hubungan yang baik antara guru, anak dan orangtua, melakukan proses pembelajaran dengan prinsip paikem bagi siswa lamban belajar, dimulai dari hal-hal yang diminati anak, kemudian anak dibawa secara perlahan pada materi yang akan dikembangkan atau diajarkan.

2.1.6.5 Strategi pengajaran anak lamban belajar (*slow learner*)

Beberapa strategi pengajaran dapat dilakukan dalam membantu anak lamban belajar di banding teman-teman sekelasnya, antara lain :

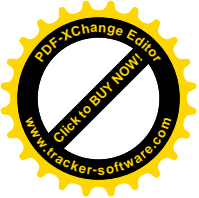
- (1) Selalu dimulai dengan *review* atau mengulang materi sebelumnya untuk mengkaitkan materi pelajaran yang akan disampaikan.
- (2) Gunakan bahasa yang sederhana namun jelas dengan perlahan.
- (3) Lakukan *task analysis* atau analisa tugas jika akan memberikan PR.



- (4) Beri tugas yang lebih sederhana atau lebih sedikit dibanding teman-temannya untuk menghindari frustrasi.
- (5) Lakukan pengulangan materi jika akan menyampaikan materi pelajaran, akan mendapatkan hasil yang lebih optimal jika disampaikan secara individual.
- (6) Pembelajaran dilakukan secara kooperatif karena anak lamban belajar tidak menyenangi kompetitif.
- (7) Berikan pemahaman konsep.
- (8) Gunakan multi pendekatan motivasi belajar
- (9) Ajak orang tua sebagai mitra kerja guru.
- (10) Desain pembelajaran yang menempatkan siswa dalam konteks pembelajaran yang “tidak pernah gagal” untuk menghindari perasaan tidak berdaya.

2.1.6.6 Pembelajaran anak tunadaksa

Gagne dalam Karyana dan Widati (2013: 85) membagi kegiatan belajar mengajar ke dalam 8 fase, yaitu motivasi, perhatian, mengingat, mengungkapkan kembali, generalisasi dan transfer, perbuatan, balikan dan penguatan. Motivasi merupakan sesuatu yang berperan untuk mengarahkan, mendorong dan memberi kekuatan, serta memelihara perhatian. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ada dua teori motivasi yaitu teori humanis dan teori behaviorisme. Menurut teori humanis (Cars Roers dalam Karyana dan Widati) berpendapat bahwa setiap anak memiliki keinginan untuk belajar maka guru harus mengembangkan sifat yang dimiliki anak. Adapun menurut teori behaviorisme (Skinner dalam Karyana dan Widati) berpendapat bahwa lingkungan dapat mempengaruhi motivasi siswa.



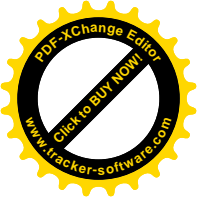
Mengacu pada teori behaviorisme, maka dalam kegiatan belajar mengajar tunadaksa hendaknya guru :

- (1) Mencatat tingkah laku anak, lalu menentukan tingkah laku yang perlu diperbaiki.
- (2) Memberikan penghargaan yang tepat bila anak mencapai prestasi atau menjalankan apa yang diharapkan.
- (3) Mantap dalam tindakan, setia pada prinsip.
- (4) Memberikan contoh yang dikehendaki.
- (5) Menciptakan lingkungan yang menyenangkan.

2.1.6.7 Perencanaan kegiatan belajar mengajar anak tunadaksa

Ronald L. Taylor (1984) dalam Karyana dan Widati (2013: 89) berpendapat bahwa anak tunadaksa yang mengalami kelainan otot rangka dapat diberikan pembelajaran di kelas karena kecerdasannya masuk dalam kategori normal, namun karena keterbatasannya ia harus diberikan layanan pendidikan yang diindividualisasikan. Adapun langkah-langkah utama dalam merancang suatu program pembelajaran individual (PPI) adalah:

- (1) Membentuk tim PPI atau tim penilai program pendidikan yang diindividualisasikan yang mencakup guru khusus, guru reguler, diagnostician, kepala sekolah, orang tua, siswa, serta personel lain yang diperlukan.
- (2) Menilai kekuatan dan kelemahan serta minat siswa yang dapat dilakukan melalui asesmen.



- (3) Mengembangkan tujuan-tujuan jangka panjang dan sasaran-sasaran jangka pendek.
- (4) Merancang metode dan prosedur mencapai tujuan.
- (5) Menentukan metode dan evaluasi kemajuan.

2.1.6.8 Prinsip pembelajaran anak tunadaksa

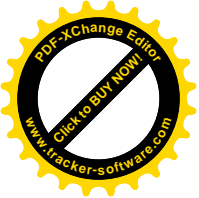
Menurut Karyana dan Widati (2013: 90) ada beberapa prinsip utama dalam memberikan pendidikan pada anak tunadaksa, diantaranya prinsip multisensori dan prinsip individualisasi. Prinsip multisensori berkaitan dengan pengembangan indera yang dimiliki siswa tunadaksa sehingga dapat membantu proses pemahaman sedangkan prinsip individualisasi berkaitan dengan menitikberatkan kemampuan dan potensi anak secara individu di kelas.

2.1.6.9 Strategi pembelajaran anak tunadaksa

Lingkungan yang paling kondusif guna pembelajaran siswa-siswa berkelainan fisik adalah kelas reguler. Diperlukan suatu modifikasi lingkungan fisik dengan integrasi siswa-siswa ini memerlukan penggabungan tenaga konsultan yang efektif dikelas. Sikap-sikap yang diterima di kelas menciptakan konteks yang tepat dalam membantu kemandirian yang akan diperlukan siswa berkelainan fisik dalam kehidupan. Strategi pembelajaran anak tunadaksa menurut Smith (2015: 188) diantaranya adalah :

- (1) Pengajaran kemandirian yang optimal

Penekanan dalam pengajaran bagi siswa tunadaksa adalah pada kemandirian yang optimal dan memperhatikan perbedaan antar pribadi (*self-determination*), kemampuan siswa dalam menegakan hubungan sosial dapat

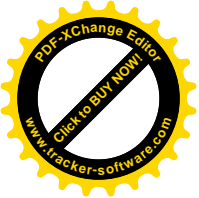


ditingkatkan sehingga ia menjadi lebih mandiri. Beberapa cara dalam mendorong perbedaan antar pribadi dalam diri siswa dengan keterbatasan gerak menurut Brotherson (1995) dalam Smith (2015: 189) adalah :

- 1) Mengajarkan pilihan, pembuat keputusan dan kemampuan perlindungan diri.
- 2) Membangun lingkungan sekolah yang menjamin kesempatan dalam memilih.
- 3) Berfungsi sebagai sumberdaya baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat.
- 4) Menjadi penasehat perubahan masyarakat dan dukungan pendampingan orangtua.
- 5) Dukungan masyarakat akan mempermudah kebutuhan anak-anak ini.
- 6) Membentuk kemitraan dengan masyarakat.

(2) Belajar kelompok

Pengelompokan yang *flexibel (flexibel grouping)* adalah suatu teknik yang memberikan siswa dengan dan tanpa kelainan bekerjasama ke arah pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Pengelompokan siswa ini dapat dibentuk dan diubah disesuaikan agar tujuan pembelajarannya yang utama dapat dipenuhi dan mengembangkan hal yang baru. *Flexibel grouping* meliputi sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, tiap anggota kelompok didorong untuk memberikan tugas yang dekat dan tertentu menurut kemampuannya (Unsworth, 1984 dalam Smith, 2015). Pengelompokan kerjasama (*cooperative grouping*) adalah pembentukan kelompok kecil dari siswa yang memiliki kemampuan dan keahlian berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa



cooperative grouping menghasilkan hubungan yang lebih kuat antara siswa dan pencapaian akademis yang lebih tinggi (Slavin, 1987 dalam Smith, 2015).

(3) *Team teaching*

Hal yang penting bagi pembentukan kelas dan sekolah yang lebih inklusif adalah pendidik bekerjasama lebih kooperatif dalam memberikan lingkungan pembelajaran yang kondusif serta pengajaran yang efektif bagi semua siswa berkelainan, namun juga memberikan hasil pembelajaran yang meningkat bagi siswa lain. Dengan perencanaan serta pembuatan tujuan yang terartikulasi dengan jelas, siswa berkelainan mendapatkan pembelajaran efektif bersama siswa yang tidak mempunyai kelainan (Jones dan Carlier, 1995 dalam Smith, 2015).

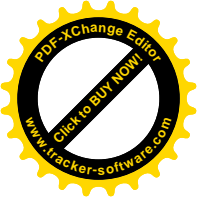
2.1.7 Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus

2.1.7.1 Pengertian perkembangan

Istilah perkembangan juga tercakup konsep usia, yang diawali dari saat pembentukan pemuahan dan berakhir dengan kematian. Menurut Monks (2001) dalam Desmita (2012: 9) pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk kepada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali.

2.1.7.2 Faktor yang memengaruhi perkembangan

Desmita (2012: 9) menyebutkan setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan. Diantaranya adalah faktor yang berasal dari dalam



diri individu, faktor yang berasal dari luar diri individu dan faktor-faktor umum. Faktor yang berasal dari diri individu contohnya adalah bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan dan insting. Ada lima jenis faktor yang mempengaruhi perkembangan berasal dari luar diri individu yaitu makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan faktor-faktor umum lainnya yaitu inteligensi, jenis kelamin, kelenjar gondok, kesehatan dan ras.

2.1.7.3 Aspek perkembangan peserta didik

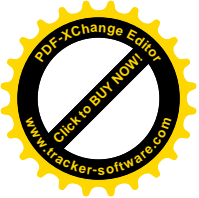
Peserta didik berkembang dalam beberapa aspek, hal itu dialami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Terdapat tiga macam perkembangan yang dialami peserta didik diantaranya perkembangan aspek fisik, aspek kognitif dan aspek psikomotor. Aspek perkembangan peserta didik menurut Desmita (2012: 34) adalah:

(1) Perkembangan aspek fisik

Perkembangan fisik atau yang disebut pertumbuhan biologis (*biological growth*) meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ inderawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain.

(2) Perkembangan aspek kognitif

Perkembangan kognitif berkaitan dengan pengetahuan peserta didik, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana individu dapat belajar dan mengelola pengalaman dan lingkungan belajarnya sehingga menciptakan suatu pengetahuan.



(3) Perkembangan aspek psikososial

Perkembangan ini berkaitan dalam kegiatan adaptasi individu di lingkungan sosialnya, bagaimana ia harus berperilaku dan mengikuti norma dalam masyarakat. Dalam proses perkembangan pada usia sekolah, diharapkan peserta didik dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungannya, dapat beradaptasi dalam berbagai situasi, dapat menjadi diri sendiri dan menunjukkan sisi sosialnya serta mampu mengelola emosi dan kepribadian yang wajar. Kematangan aspek psikososial diperlukan sebagai bekal menjadi manusia dewasa.

2.1.7.4 Perkembangan kognitif piaget

Piaget membagi perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap yaitu : Tahap sensori motorik (sejak lahir sampai usia 2 tahun), pada tahap ini bayi bergerak dari tindakan refleks instingtif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Tahap pra operasional (usia 2 sampai 7 tahun), pada tahap ini anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Tahap konkret-operasional (usia 7-11 tahun), pada tahap ini anak dapat berfikir logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. Tahap operasional formal (usia 11 tahun keatas), pada tahap ini remaja berfikir dengan cara yang lebih abstrak, logis dan lebih idealistik. Pada tahap ini diawali sejak usia 11 tahun hingga manusia mencapai kedewasaannya.



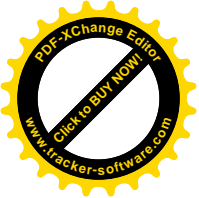
2.1.7.5 Perkembangan kognitif anak usia SD

Mengacu pada teori kognitif piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret-operasional, yaitu masa dimana aktifitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Hal ini disebabkan karena pada masa konkret operasional anak telah mengembangkan tiga macam proses yang disebut dengan operasi-operasi yaitu negasi, resiprokasi dan identitas. Negasi berarti ia telah memahami proses yang terjadi di dalam lingkungannya, resiprokasi berarti anak telah memahami hubungan sebab akibat sedangkan identitas berarti anak mampu untuk mengkonversikan dimensi lain yang berhubungan dengan kemampuan kognitifnya.

2.1.7.6 Perkembangan fisik peserta didik

Seifert dan Hoffnug (1994) dalam Desmita (2012: 73) berpendapat bahwa perkembangan fisik merupakan perubahan yang berkaitan dengan berfungsinya organ tubuh secara optimal seperti otak, jantung, penglihatan dan sebagainya, serta perkembangan dalam keterampilan motorik dan seksual.

Di usia sekolah dasar, pertumbuhan dan perkembangan fisik lebih lambat hingga masa pubertas atau dua tahun menjelang anak pubertas. Karena itu, masa ini sering sering juga disebut sebagai periode tenang sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang masa remaja. Meskipun merupakan masa tenang, tetapi hal ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti. Sampai dengan usia sekitar 6 tahun terlihat bahwa badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Kemudian pada usia 12 tahun tinggi anak mencapai 60 inci dan



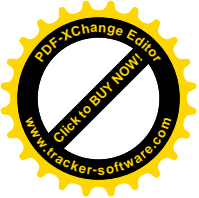
berat 40 hingga 42,5 kg (Mussen, Conger dan Kagan, 1969 dalam Desmita, 2012: 74)

2.1.7.7 Perkembangan hubungan interpersonal peserta didik

Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antarpribadi. Peserta didik sebagai pribadi yang unik adalah makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, peserta didik senantiasa melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Knapp (1984) dalam Desmita (2012) interaksi sosial dapat menyebabkan seseorang menjadi dekat dan merasakan kebersamaan, namun sebaliknya, dapat pula menyebabkan seseorang menjadi jauh dan tersisih dari suatu hubungan interpersonal. Bagi peserta didik usia SD, interaksi sosial terjadi pertama kali didalam keluarga, kemudian dengan teman sebaya.

(1) Hubungan sosial dengan keluarga

Bersamaan dengan masuknya anak ke sekolah dasar, maka terjadilah perubahan hubungan anak dengan orangtua. Sekalipun tidak lagi menjadi subyek tunggal dalam pergaulan anak, orangtua tetap menjadi bagian penting dalam proses ini, karena mereka yang menjadi figur sentra dalam kehidupan anak. Melalui proses ini, anak akan semakin memahami kebutuhan dan perasaanya, sekaligus kebutuhan dan perasaan orang lain. Sesuai dengan perkembangan kognitifnya yang semakin matang, maka pada usia sekolah, anak secara berangsur-angsur lebih banyak mempelajari mengenai sikap-sikap dan motivasi orangtuanya, serta memahami aturan-aturan keluarga, sehingga mereka menjadi lebih mampu untuk mengendalikan tingkah lakunya meskipun terjadi pengurangan pengawasan dari orangtua terhadap anaknya selama usia sekolah

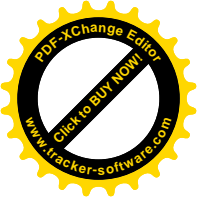


dasar, namun orangtua masih terus memonitor usaha-usaha yang dilakukan anak dalam memelihara diri mereka sekalipun secara tidak langsung. Seifert & Hoffnug (1994) dalam Desmita (2012) menduga pada masa akhir anak-anak, secara tipikal ikatan antara orangtua dan anak-anak adalah sangat kuat.

Sejalan dengan pendapat tersebut adalah Benn, Akiva, & Arel (2012: 1476) berpendapat bahwa peran kedua orang tua dapat membantu siswa dalam mengelola stres. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan serta memaksimalkan pengembangan keterampilan ditengah tingginya populasi. Karena penanganan anak disabilitas membutuhkan perhatian khusus, pengetahuan yang memadai, dan kemampuan mengelola emosi serta mampu mengembangkan kapasitas bagi pemenuhan kebutuhan anak disabilitas.

(2) Hubungan sosial dengan teman sebaya

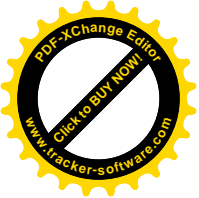
Hartub, dkk (1996) dalam Desmita (2012) menyatakan, *“The social relations of children and adolescents are centered on their friends as well as their families”*, sebab bagaimanapun bagi anak usia sekolah, teman sebaya (*peer*) mempunyai fungsi yang hampir sama dengan orangtua. Barker dan Wright dalam Desmita (2012) mencatat bahwa anak-anak usia 7 hingga 11 tahun menghabiskan 40% waktunya untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Interaksi teman sebaya dari kebanyakan anak usia sekolah terjadi dalam grup atau kelompok sehingga periode ini disebut “usia kelompok”. Krasnor (1980) dalam Desmita (2012) mencatat adanya perubahan sifat dari kelompok teman sebaya pada anak usia sekolah. Ketika anak berusia 6 hingga 7 tahun, kelompok teman sebaya biasanya terdiri dari teman main yang berada dalam lingkungannya. Ketika anak berusia 9



tahun, kelompok-kelompok menjadi lebih formal, anak-anak berkumpul menurut minat yang sama. Halinan (1981) dalam Desmita (2012) para ahli psikologi melakukan penelitian dengan menyusun sebuah sosiogram. Berdasarkan informasi dari hasil penelitian, peneliti membedakan anak-anak atas dua, yaitu anak-anak yang populer dan tidak populer.

Hartub (1983) dalam Desmita (2012) mencatat bahwa anak yang populer adalah anak yang ramah, suka bergaul, bersahabat, sangat peka secara sosial, dan sangat mudah bekerjasama dengan orang lain. Popularitas juga dihubungkan dengan IQ dan prestasi akademik. Anak-anak lebih menyukai anak yang berprestasi sedang, mereka sering menjauh dari anak yang sangat cerdas dan sangat rajin disekolah dan juga mereka yang pemalas secara akademis (Zigler & Stevenson, 1993 dalam Desmita, 2012). Anak yang tidak populer dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu anak-anak yang ditolak (*rejected children*) dan anak-anak yang diabaikan (*neglected children*). Anak-anak yang diabaikan adalah mereka yang menerima sedikit perhatian dari anak lainnya. Sedangkan anak yang ditolak adalah anak yang tidak disukai oleh temannya karena mereka cenderung bersifat mengganggu. Masalah perilaku akademis di sekolah kebanyakan disebabkan oleh anak-anak yang ditolak dalam lingkungan bermainnya, mereka cenderung berperilaku kurang dewasa dan semaunya sendiri (Putallaz & Waserman, 1990 dalam Desmita, 2012).

Mc Devitt dan Ormrod (2002) dalam Desmita (2012) mendefinisikan friendship sebagai “*Peer relationship that is voluntary and reciprocal and includes shared routines and customs*” dimana setidaknya terdapat tiga kualitas



yang membedakan persahabatan dengan bentuk hubungan teman sebaya lainnya yaitu adanya hubungan yang dibangun secara sukarela, hubungan yang dibangun atas dasar kesamaan kebiasaan dan hubungan yang dibangun atas dasar hubungan timbal balik. Sehingga pada usia ini anak akan terbentuk rasa percaya dirinya.

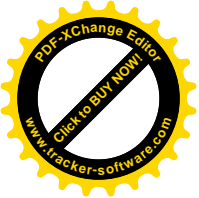
2.1.7.8 Perkembangan kognitif anak *slow learner*

Perkembangan kognitif berkaitan dengan aspek akademik dan erat hubungannya dengan keadaan kesulitan belajar. Masalah-masalah kemampuan bicara, membaca, menulis, mendengarkan, berfikir, dan matematis semuanya merupakan penekanan terhadap aspek akademik atau kognitif. Penekanan seperti ini merefleksikan keyakinan bahwa masalah anak berkesulitan belajar lebih banyak berkaitan dengan wilayah akademik dan bukan disebabkan oleh tingkat kecerdasan yang rendah (Somantri, 2012: 200).

Akerdi, dkk (2017: 14) berpendapat, fakta dilapangan menunjukkan dalam beberapa kelas, siswa yang tidak mampu berkompetisi dengan teman kelasnya diakhir tahun mengalami kegagalan pengalaman. Meskipun dalam pembelajaran siswa *slow learner* memiliki banyak hambatan, namun Vasudevan (2017: 309) menduga bahwa anak lamban belajar mampu meraih kesuksesan akademik melalui tambahan jam pelajaran, dan adaptasi lingkungan belajar.

2.1.7.9 Perkembangan fisik anak *slow learner*

Pengamatan yang dapat dilakukan pada siswa *slow learner* adalah sebab-sebab kesulitan belajarnya dengan pengamatan yang cermat terhadap keadaan



fisiknya meliputi intensitas pendengaran, penglihatan, pembicaraan, vitamin, dan gizi pada waktu bayi.

2.1.7.10 Perkembangan sosial anak *slow learner*

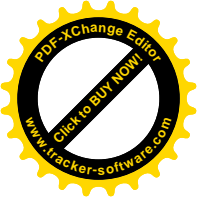
Dua karakteristik yang sering diangkat sebagai karakteristik sosial-emosional anak berkesulitan belajar ialah kelabilan emosi dan ke-impulsifan. Kelabilan emosional ditunjukkan oleh sering berubahnya suasana hati dan temperamen. Keimpulsifan merujuk kepada lemahnya pengendalian terhadap dorongan-dorongan berbuat.

2.1.7.11 Perkembangan kognitif anak tunadaksa

Keadaan tunadaksa menyebabkan gangguan dan hambatan dalam keterampilan motorik seorang anak dan hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan motorik yang lebih kompleks pada tahap berikutnya (Somantri, 2012: 127). Menurut Piaget, anak tersebut tidak mampu memperoleh skema baru dalam beradaptasi dengan suatu laju perkembangan yang normal. Keterlambatan perkembangan ini diawali dengan hambatan dalam fungsi motorik sederhana yang akan berpengaruh terhadap kegiatan eksplorasi lingkungan anak secara wajar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak tersebut. Piaget berpendapat bahwa semakin besar hambatan yang dialami anak dalam melakukan interaksi sosial dan adaptasi lingkungan maka makin besar pula hambatan yang akan dialaminya dalam perkembangan kognitifnya.

2.1.7.12 Perkembangan fisik anak tunadaksa

Aspek fisik merupakan potensi yang berkembang dan harus dikembangkan oleh individu. Pada anak-anak tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian

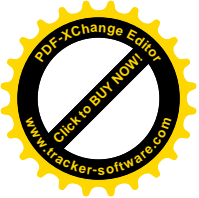


tubuh yang tidak sempurna. Dalam usahanya untuk mengaktualisasikan dirinya secara utuh, ketunadaksaan yang dialami anak tunadaksa biasanya dikompensasikan oleh bagian tubuh yang lain (Somantri, 2012: 126).

2.2.7.13 Perkembangan sosial anak tunadaksa

Somantri (2012: 132), keanekaragaman pengaruh perkembangan yang bersifat negatif menimbulkan resiko bertambah besarnya kemungkinan munculnya kesulitan dalam penyesuaian diri pada anak-anak tunadaksa. Hal ini berkaitan erat dengan perlakuan masyarakat terhadap anak-anak tunadaksa. Sebenarnya kondisi sosial positif menunjukkan kecenderungan untuk menetralisasi akibat keadaan tunadaksa tersebut. Nampak atau tidaknya keadaan tunadaksa itu merupakan faktor yang penting dalam penyesuaian diri anak tunadaksa dengan lingkungannya, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perlakuan anak-anak normal terhadap anak-anak tunadaksa. Keadaan tunadaksa yang tidak nampak, lebih memungkinkan anak untuk menyesuaikan diri dengan wajar dibandingkan apabila ketunadaksaan tersebut nampak. Kelainan yang dimiliki anak tunadaksa dapat berpengaruh pada perkembangan sosialnya dimana kurangnya rasa percaya diri untuk masuk dalam kelompok permainan.

Rasa percaya diri siswa tunadaksa perlu di kembangkan oleh guru dibantu teman sebaya siswa. Hal ini dikarenakan siswa tunadaksa memiliki rasa percaya diri yang kurang sebagai akibat dari ketidaksempurnaan fisik yang dimiliki. Biastro, Frank dan Larwin (2015: 106) berpendapat bahwa keterlibatan di kegiatan sosial dan perasaan positif berperan dalam membantu siswa dengan



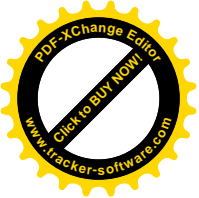
gangguan ortopedi. Jika siswa tersebut menunjukkan tanda-tanda kesepian atau depresi, kita harus memahami dan membantu dalam pengembangan kepercayaan dirinya. Peran teman sebaya tidak hanya dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa tunadaksa tetapi juga sebagai media informasi bagi guru mengenai kebutuhan maupun kesulitan yang dialami siswa tunadaksa. Mc Devitt dan Ormrod (2002) dalam Desmita (2012) mendefinisikan friendship sebagai hubungan yang sukarela, timbal balik, meliputi kebersamaan dalam melakukan rutinitas.

2.2 Kajian Empiris

Penelitian di bidang pendidikan inklusif sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, termasuk penelitian mengenai implementasi kebijakan, pembelajaran di sekolah inklusif dan perkembangan siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut, terutama di bidang inklusif dan mengenai anak berkebutuhan khusus. Beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

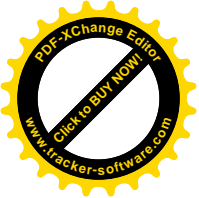
(1) Penelitian yang dilakukan oleh Praptiningrum (2010) dalam Jurnal Pendidikan

Khusus yang berjudul *Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus* menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan penyelenggaraan pendidikan inklusif belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketidaksesuaian tersebut



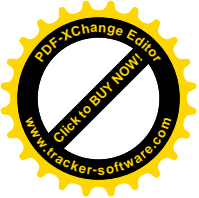
meliputi segi kondisi siswa kualifikasi guru, sarana-prasarana penunjang, dukungan dari orang tua, dan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah.

- (2) Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus yang berjudul *Pelaksanaan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh* dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan inklusi di SD Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal asesmen, RPP, PPI, peranan guru serta sarana prasarana menjadi penentu keberhasilan program inklusif.
- (3) Penelitian yang dilakukan oleh Indriawati (2013) dalam Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan yang berjudul *Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu* berpendapat bahwa permasalahan yang signifikan dalam implementasi pendidikan inklusif adalah belum terpenuhinya alokasi sumber daya bagi guru pendamping khusus. Masalah ini memicu tidak efektifnya implementasi kebijakan pendidikan inklusif di kalangan birokrasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan persepsi terjadi pada konsep mengenai program kekhususan oleh guru pendamping khusus yang ditujukan untuk pembimbingan non-akademis bagi ABK. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pembinaan bagi guru pendamping khusus serta lemahnya komunikasi kebijakan. Secara operasional, guru pendamping khusus bertugas memodifikasi bahan ajar yang tepat dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan ABK. Namun, minimnya kebutuhan finansial berimplikasi terhadap kebutuhan akses



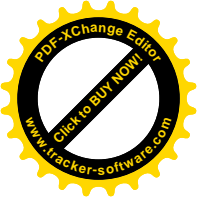
bahan ajar sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi kurang maksimal.

- (4) Penelitian yang dilakukan oleh Prastiyono (2013) dalam Jurnal Administrasi Publik yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif* menduga bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif belum sepenuhnya optimal disebabkan para implementor dari aparat birokrasi pendidikan kurang mampu menjabarkan isi kebijakan yang tertuang pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dimana didalamnya terdapat pernyataan mengenai kesungguhan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di Indonesia. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pedoman teknis serta serangkaian kegiatan yang mendukung implementasi pendidikan inklusif. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif masih perlu di evaluasi dengan menyeluruh, karena dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan yang berkaitan dengan regulasi tersebut.
- (5) Penelitian yang dilakukan oleh Elisa dan Wrastati (2013) dalam Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan yang berjudul *Sikap Guru terhadap Pendidikan Inklusi ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap* mengenai sikap guru reguler dan guru inklusif di Surabaya terhadap pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan sikap yang positif yaitu menerima terhadap sistem pendidikan inklusif tersebut meskipun sebagian kecil guru menunjukkan sikap negatif dengan menolak kebijakan tersebut. Perbedaan sikap dipengaruhi oleh latar belakang guru, persepsi mengenai ABK, tingkatan kelas siswa, pandangan



politik dan gender. Selain itu, pengalaman dan pengetahuan menjadi faktor penting bagi seorang guru untuk dapat menerima perubahan dalam dunia pendidikan.

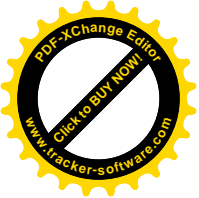
- (6) Penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2013) dalam Jurnal Edu-Bio yang berjudul *Pendidikan Inklusif di Indonesia* menyarankan beberapa media pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif diantaranya siswa dengan lamban belajar disarankan menggunakan media pembelajaran gradasi kubus, gradasi balok, silinder, manara gelang, kotak silinder, multi indra, puzzle binatang, puzzle konstruksi, puzzle bola, dan media pembelajaran yang dapat melatih konsentrasi siswa lamban belajar. Sedangkan siswa tunadaksa disarankan menggunakan media pembelajaran yang memudahkan mobilitas dan tidak mengganggu gerak aktifitasnya seperti kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, torso seluruh badan, geometri sharpe, menara gelang, menara segi tiga, gelas rasa, botol aroma, abacus dan washer, papan pasak dan kotak bilangan.
- (7) Penelitian yang dilakukan oleh Tarnoto (2013) dalam Jurnal Humanitas yang berjudul *Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD* menyimpulkan bahwa guru, siswa, sekolah, masyarakat, pemerintah orang tua, dan kurangnya sarana prasarana menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (8) Penelitian yang dilakukan oleh Isabella, Emosda dan Suratno (2014) dalam Jurnal Tekno-Pedagogi yang berjudul *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan*



Inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131/IV Kota Jambi di Kota Jambi hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan inklusif di SD Negeri 131 Kota Jambi tergolong dalam kriteria baik. Penelitian evaluasi tersebut menunjukkan prosentase sub indikator yang telah memenuhi standar sebesar 68,35% dari total prosentase sempurna 100%.

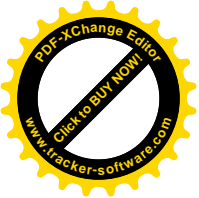
(9) Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyadi (2014) dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo* mengemukakan bahwa hasil positif di raih oleh kabupaten Sidoarjo dibuktikan melalui adanya deklarasi Sidoarjo inklusif dan diterimanya penghargaan terkait pencapaian dalam bidang pendidikan khusus dan inklusif. Komitmen untuk mengoptimalkan sumberdaya dalam segala keterbatasan dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan. Ini membuktikan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu kebijakan yang positif untuk mewujudkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

(10) Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Sudarto (2014) dalam Jurnal Pendidikan Khusus yang berjudul *Persepsi Guru Reguler terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMPN se-Kota Madya Surabaya* menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, permasalahan yang mendasari ketidaksesuaian tersebut adalah sumber daya manusia yang tidak memadai.

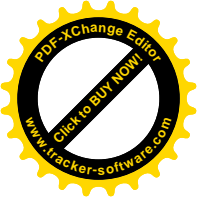


(11) Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2014) dalam Jurnal Pendidikan Islam yang berjudul *Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar Inklusi (Studi Kualitatif Deskriptif pada SD Inklusi di Jakarta Utara)* menemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif masih terdapat hambatan dalam pengelolaan maupun sumber daya manusia. Dalam mengatasi hambatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, idealnya para implementor harus memahami mengenai seluk beluk kebijakan tersebut sehingga hambatan di lapangan dapat diatasi. Berbagai kendala yang dihadapi sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif diantaranya adalah pembiayaan dari pemerintah serta tidak adanya guru pendamping khusus.

(12) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuno, Ruminiati & Sutrisno (2014) dalam Jurnal Sekolah Dasar yang berjudul *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar* menemukan bahwa permasalahan ABK dalam pembelajaran di kelas inklusif adalah kesulitan mengikuti pelajaran di kelas reguler serta sulitnya berkonsentrasi. Salah satu faktor yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar adalah kurikulum. Kurikulum terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini adalah kurikulum 2013 yang merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya dan dimodifikasi kembali oleh guru sebelum di gunakan dalam kelas inklusif. Diharapkan dengan adanya kurikulum 2013 modifikasi dapat memfasilitasi ABK dalam pencapaian hasil pembelajarannya di sekolah.

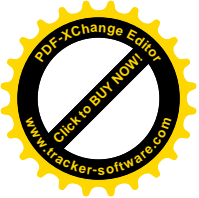


- (13) Putri (2015) dalam Skripsi yang berjudul *Implementasi Kurikulum 2013 bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Inklusi* mengemukakan bahwa perangkat pembelajaran matematika bagi peserta didik berkebutuhan khusus secara umum sama dengan peserta didik reguler namun terdapat beberapa modifikasi yang dilakukan pada program pembelajaran individual agar sesuai dengan kebutuhan dan hambatan yang dialami siswa. Kendala dalam implementasi kurikulum 2013 bagi peserta didik berkebutuhan khusus meliputi hambatan guru dalam menggunakan teknologi dan pemrograman, proses penilaian yang rumit, hambatan dalam tahapan *scientific approach* bagi peserta didik *slow learner* dan autisme serta keadaan peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan motorik sehingga menyulitkan mobilitas.
- (14) Penelitian yang dilakukan oleh Haryono, Syaifudin dan Widiastuti (2015) dalam Jurnal Penelitian Pendidikan yang berjudul *Evaluasi pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Jawa Tengah* menjelaskan bahwa kurikulum yang digunakan dalam kelas inklusif adalah kurikulum normal (kurikulum reguler) mengikuti peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Kurikulum tersebut dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan awal siswa berdasarkan hasil asesmen dan karakteristik ABK yang berada di sekolah inklusif tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran, anak berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis memiliki kebutuhan dan evaluasi tersendiri yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Setiap anak memiliki modalitas belajar dimana



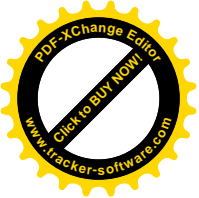
terdapat layanan penilaian atau evaluasi sebagai bentuk laporan hasil kegiatan pembelajaran di kelas.

- (15) Penelitian yang dilakukan oleh Ointu, Mufti dan Natsir (2016) dalam Jurnal Katalogis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Palu* menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Palu Sulawesi Tengah telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Keberadaan sekolah-sekolah reguler yang melayani pendidikan inklusi mampu memberikan alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat kota Palu.
- (16) Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2016) dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus yang berjudul *Pelaksanaan tugas pokok guru pendamping khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif* menemukan bahwa guru pendamping khusus belum secara keseluruhan menjalankan tugasnya di sekolah. Beberapa tugas yang belum terlaksana adalah guru pendamping khusus (GPK) tidak melakukan penyusunan instrumen asesmen dan tidak melaksanakan asesmen karena asesmen tersebut dilaksanakan di Pusat Layanan Autis (PLA) meskipun GPA melakukan koordinasi dengan tenaga pendidik lain dalam pembelajaran tetapi GPA tidak membuat PPI dan melaksanakan kunjungan rumah. Guru pendamping khusus bertugas melakukan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memberikan



bantuan layanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus serta tidak melakukan pengadaptasian media pembelajaran, remedial dan pembelajaran individual. Masalah lain yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan tugas pokok GPK adalah bimbingan berkesinambungan yang seharusnya rutin dilaksanakan dengan membuat catatan khusus namun dalam hal ini GPK tidak melaksanakannya.

(17) Sahidi (2016) dalam Tesis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi* menjelaskan mengenai komponen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diantaranya kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus dilakukan untuk keperluan penjarangan (screening), pengalihanganan (referral), klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Dalam pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini terdapat 3 model pengembangan kurikulum yang digunakan yaitu model kurikulum umum (reguler), model kurikulum umum dengan dimodifikasi dan model kurikulum yang diindividualisasikan. Komponen tenaga pendidik di sekolah umum penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus (GPK). Sedangkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dimana pendidikan inklusif diselenggarakan dikarenakan sekolah inklusif merupakan sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sehingga pembiayaan berada dibawah kewenangan bantuan



operasional sekolah dan sekolah dapat mengajukan proposal untuk memenuhi kebutuhan diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Terakhir, proses kegiatan belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dilakukan dengan enam cara yaitu : *integrated in the regular classroom, one to one teaching, small group, program khusus, dan therapy.*

(18) Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2016) dalam *Journal of Disability Studies* yang berjudul *Implementasi Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)* mengemukakan bahwa dalam praktiknya terdapat faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum 2013 pada ABK diantaranya : faktor pendukungnya adalah tidak ada diskriminasi antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus sehingga proses tersebut menerapkan karakter kerjasama pada anak untuk menghargai perbedaan dan agar anak memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum tersedianya sumberdaya yang memadai dan kurang efisiennya waktu pembelajaran.

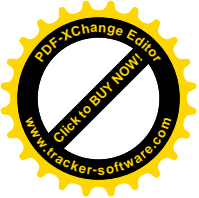
(19) Penelitian yang dilakukan oleh Mareza (2016) dalam *Jurnal Indigenous* yang berjudul *Pengajaran Kreatifitas Anak Berkebutuhan Khusus pada Pendidikan Inklusi* dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan ekspresi kreatifitas bagi siswa sekolah dasar inklusif belum diterapkan secara optimal. Beberapa kompetensi dasar dalam pembelajaran seni rupa belum dapat diberikan kepada siswa dikarenakan kurangnya pengalaman guru dalam berkesenian yang



berdampak pada kurangnya pengalaman artistik bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

(20) Sulistyaningsih (2017) dalam Skripsi yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Tanjung 1 Purwokerto* mengenai Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto menunjukkan bahwa ada standar khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu berupa surat keputusan Bupati Banyumas tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada tahun 2011 dengan nomor surat 421/149/2011. Pendidikan inklusif merupakan salah satu model pendidikan yang dirancang secara khusus dan merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan khususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk menghindari adanya segregasi. Kegiatan pembelajaran di kelas inklusif tidak berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas reguler. Menurut penulis dalam penelitian ini proses pembelajaran di kelas inklusif cukup berhasil, dan keberhasilan dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor dari guru, siswa, lingkungan, sarana prasarana, dan evaluasi pembelajaran.

(21) Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2017) dalam Jurnal Kelola Manajemen Pendidikan yang berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar* mengenai pelaksanaan program inklusif yang telah melalui proses penetapan dari dinas dengan berpedoman pada Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Berdasarkan hasil evaluasi pada komponen *input* dan prosesnya, sarana prasarana dan kompetensi guru telah cukup memadai untuk menangani ABK dalam kategori ringan hingga sedang di sekolah. Sehingga menghasilkan

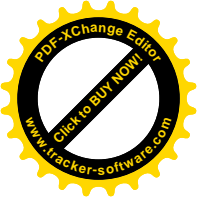


output/product yang membanggakan yaitu berkembangnya potensi serta prestasi akademik dan non akademik ABK.

(22) Penelitian yang dilakukan oleh Amka (2017) dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial yang berjudul *Evaluasi Pendidikan Karakter Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Reguler* berpendapat bahwa penilaian pembelajaran bagi ABK dilakukan menggunakan dua model, yaitu dengan tes yang menghasilkan data kualitatif dan kuantitatif. Melalui model penilaian yang beragam maka menghasilkan data yang lebih akurat mengenai pencapaian siswa ABK dalam pembelajaran di kelas inklusif. Layanan pembelajaran yang diberikan guru dalam pendidikan inklusif disesuaikan dengan pemahaman ABK dalam menerima materi.

2.3 Kerangka Berpikir

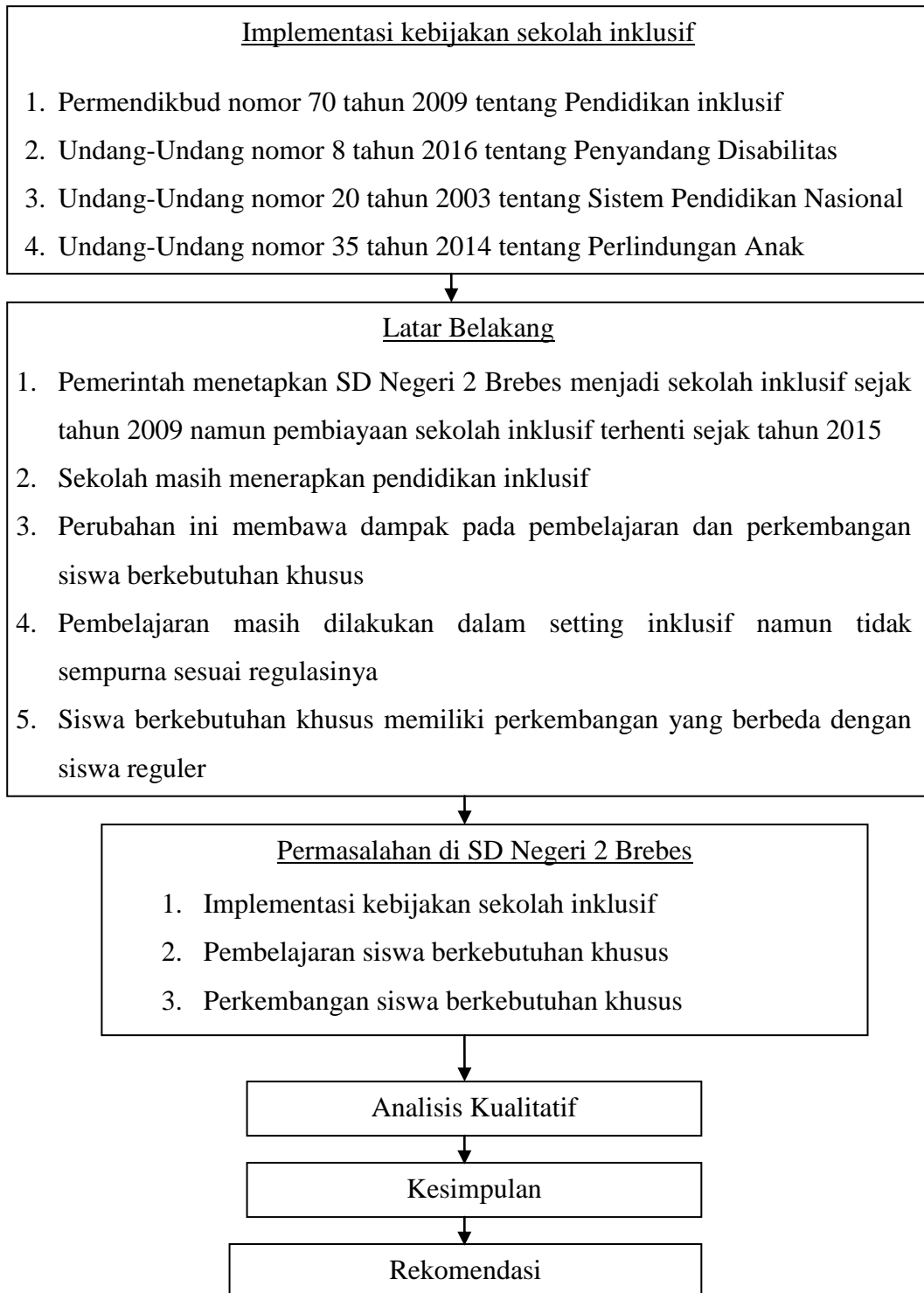
Konsep siswa berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan siswa luar biasa. Filosofi sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang menghargai bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik, menghargai dan menghormati semua orang sebagai bagian dari masyarakat, sehingga adanya keberagaman dari setiap anggota masyarakatnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan sebuah kebijakan yang digulirkan untuk memupus diskriminasi di dalam bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan konsep *education for all*. Namun pada pelaksanaannya masih banyak hal yang perlu diperbaiki.



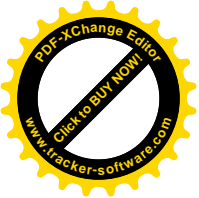
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendidikan inklusif melalui berbagai peraturan perundangan baik mengenai penyandang disabilitas, perlindungan anak, pedoman umum penyelenggaraan inklusif serta tercantum pula dalam undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Fakta yang terjadi dilapangan saat ini adalah pembiayaan inklusif telah terhenti. Beberapa sekolah masih berupaya untuk menumbuhkan kembali penyelenggaraan pendidikan non diskriminasi ini. Namun, tidak jarang sekolah yang memilih berhenti menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan mulai menerima siswa normal saja. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan biaya yang telah terhenti dari pemerintah membawa dampak yang signifikan pada pembelajaran dan perkembangan siswanya. Karena pelaksanaan kegiatan inklusif di sekolah tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Penerapan implementasi yang dilakukan sekolah pasca pembiayaan terhenti perlu di evaluasi apakah memuat berbagai prinsip yang telah digariskan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan inklusif atau tidak. Pelaksanaan pembelajaran dan perkembangan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif juga perlu di identifikasi apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang telah ditetapkan atau belum. Hasil identifikasi tersebut dapat digunakan sebagai perbaikan bagi kualitas pendidikan inklusif di Indonesia. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan studi pustaka menambah pengetahuan sebagai bekal dalam melakukan wawancara dan studi pustaka mengenai pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif dan dampak perkembangan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Berikut bagan dari kerangka berpikir peneliti



Gambar 3. Skema Kerangka Berpikir



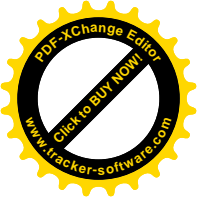
BAB 5

PENUTUP

Bab 5 yaitu penutup. Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran sesuai dengan manfaat penelitian. Berikut penjelasannya.

5.1 Simpulan

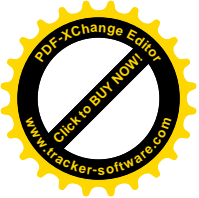
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, permasalahan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah terhentinya biaya dari pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional di sekolah seperti ketiadaan GPK, guru kunjung, pelaksanaan asesmen, layanan bina gerak, pelaksanaan program inklusif, dan pembuatan PPI. Namun, SD Negeri 2 Brebes masih mengimplementasikan pendidikan inklusif meski pembiayaan telah berhenti. Alasan sekolah masih mengimplementasikan pendidikan inklusif karena prinsip non diskriminasi yang memegang amanah bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Sampai saat ini tidak ada regulasi pencabutan surat keputusan sekolah inklusif. Namun ketiadaan biaya operasional dari pemerintah membuat sekolah hanya mampu menerima siswa lamban belajar dan mampu ajar saja. Program pendidikan inklusif tidak berjalan sesuai regulasinya dan hanya mampu menjalankan program jangka pendek berupa penambahan jam pelajaran. Sekolah masih memiliki koordinator inklusif yang ditunjuk berdasarkan SK kepala sekolah. Tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri 2 Brebes rutin mengikuti kegiatan bintek



dan workshp inklusif namun sejak pembiayaan terhenti kegiatan tersebut tidak lagi diadakan. Sarana prasarana di sekolah inklusif cukup memadai namun belum dapat memenuhi semua kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

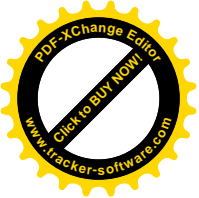
Pembelajaran di kelas inklusif meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan perencanaan meliputi pemanfaatan hasil asesmen, kurikulum yang digunakan, dan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan. Guru kelas menggunakan hasil asesmen awal sebagai dasar pemenuhan kebutuhan dan layanan siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Akibat pembiayaan yang terhenti, asesmen yang dilakukan hanya asesmen calistung yang dilaksanakan ketika di kelas satu. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusif mengikuti kurikulum reguler peraturan pemerintah yaitu kurikulum 2013. Kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sama antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus, perbedaan hanya terletak pada bobot soal saat siswa berkebutuhan khusus kesulitan mengikuti pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi sumber belajar, perangkat pembelajaran, cakupan materi, tujuan, metode, media, evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.

Dalam kelas inklusif, rencana pelaksanaan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus sama dengan siswa reguler. Guru tidak membuat PPI dengan alasan siswa berkebutuhan khusus masih mampu ajar. Sumber belajar, perangkat pembelajaran, cakupan materi, tujuan pembelajaran, metode, media, dan evaluasi di rumuskan sama. Guru memodifikasi penilaian dan pelaksanaannya hanya ketika siswa berkebutuhan khusus kesulitan mencapai standar evaluasi yang ditetapkan. Selain itu guru melakukan strategi penambahan jam belajar bagi



siswa berkebutuhan khusus lamban belajar di luar jam pelajaran agar siswa tersebut dapat memahami materi yang belum ia pahami dan tidak tertinggal di kelas.

Perkembangan siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusif meliputi perkembangan fisik, kognitif dan sosial. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh orangtua dan lingkungan. Pengaruh orangtua meliputi kondisi ibu saat mengandung, ketika melahirkan dan pasca melahirkan. Sedangkan lingkungan yaitu situasi dan kondisi anak ketika belajar di sekolah. Berdasarkan hasil asesmen, observasi, dan wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa lamban belajar mengalami perkembangan fisik dan sosial yang normal. Hanya saja ia kurang memiliki rasa empati terhadap teman sebaya sebagai akibat dari kurangnya kemampuan untuk memahami pengalaman dan pembicaraan orang lain karena dampak kelambanan yang dimiliki. Sedangkan dalam perkembangan kognitif ia memiliki hambatan dalam pembelajaran dan sulit memahami konsep, hafalan dan hitungan. Perkembangan kognitif dan sosial siswa tunadaksa menunjukkan hasil yang positif. Ia memiliki bakat dan potensi dalam seni vokal serta mampu berinteraksi dan bersosialisasi baik dengan orang lain. Hanya saja ia kurang mampu mengeksplorasi lingkungan dan bermain aktif bersama teman sebayanya di sekolah akibat keterbatasan fisik yang dimiliki. Berkaitan dengan perkembangan fisik, siswa tunadaksa tidak mampu mengikuti pembelajaran yang berkaitan dengan fisik sehingga guru memodifikasi penilaian fisik dengan penilaian kognitif yang sesuai dengan materi yang diajarkan.



Berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif muncul seiring dengan terhentinya pembiayaan dari pemerintah. Namun, guru memiliki solusi jitu dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam mengatasi hambatan dalam implementasi, koordinator inklusif aktif melakukan komunikasi dengan paguyuban guru inklusif, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran dan perkembangan siswa berkebutuhan khusus, guru melakukan komunikasi dengan orangtua serta rutin memonitor perkembangan belajar dan perkembangan lain yang berkaitan dengan keberadaan siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusif.

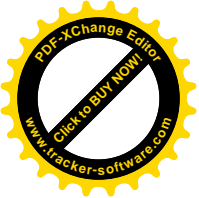
5.2 Saran

5.2.1 Bagi Guru

Saran dalam pelaksanaan inklusif bagi guru hendaknya guru melakukan asesmen pada setiap siswa berkebutuhan khusus ketika naik kelas sehingga guru dapat menentukan kebutuhan dan perkembangan siswa tersebut. Bagi siswa tunadaksa hendaknya diberi layanan bina gerak agar ia dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan fisik dalam pembelajaran. Guru hendaknya menggunakan metode dan media pembelajaran yang beragam agar siswa lamban belajar tidak merasa bosan.

5.2.2 Bagi sekolah

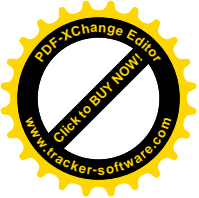
Sekolah hendaknya memfungsikan kembali ruang inklusif dan menyediakan media pembelajaran yang beragam bagi siswa berkebutuhan khusus.



Selain itu, sekolah hendaknya rutin memonitor perkembangan siswa berkebutuhan khusus dan mengidentifikasi bakat dan minatnya.

5.2.3 Bagi peneliti lanjutan

Bagi peneliti lanjutan dapat berguna sebagai referensi sehingga dapat menambah wawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan menganalisis lebih dalam mengenai kebutuhan serta karakteristik siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

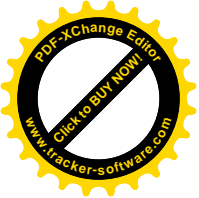


DAFTAR PUSTAKA

- Akerdi, E.M., Sadati, S. F. R., Moghaddam, S. T. A., Fereydooni, F., & Moafi, M. (2017). Investigating the educational and behavioral problems of slow-learners of neka during 2013-2014. *International Academic Journal of Social Sciences*. Vol. 4, No. 3, 2017, pp 9-16. <http://www.iaiest.com>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Alfian. (2013). Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Edu-bio*. Vol 4. Tahun 2013. <http://e-journal.iainjambi.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi> (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Alimin, Z. (2013). Paradigma Pendidikan Inklusif sebagai Upaya Memperluas Akses dan Perbaikan Mutu Pendidikan. *JASSI_Anakku*. Volume 12 Nomor 2 Tahun 2013. <http://ejournal.upi.edu>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Amelia, W. (2016). Karakteristik dan Jenis Kesulitan Belajar Anak Slow Learner. *Jurnal Ilmu Kesehatan Aisyah*. Volume 1 Nomor 2. <https://ejournal.stikesaisyah.ac.id/index.php/jika/article/view/21>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Amka. (2017). Evaluasi Pendidikan Karakter Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Reguler. *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*. Vol. 3 No.2. <http://www.rumahjurnal.net> (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Ariastuti, R. & Herawati, V. D. (2016). Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. Volume 1 Nomor 1. <http://media.neliti.com>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, A. 2017. *Media Pembelajaran*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.



- Asih, S. S. 2011. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Semarang: Unnes Press.
- Aziz, A. N. 2015. Analisis Proses Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) *Slow Learner* di Kelas Inklusif SMP Negeri 7 Salatiga. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Barnawi & Arifin, M. 2014. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.
- Benn, R., Akiva, T., & Arel, S. (2012). Mindfulness training effect for parents and educators of children with special needs. *Developmental Psychology*. Vol 43, No 5, 1476-1487. <http://dx.doi.org>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Biaastro, L., Frank, H., & Larwinm K. H. (2015) Looking at the Social Activity for Adolescents with Orthopedic Impairments. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*. Vol. 4, No. 3, pp. 106-111. Online. <http://iaesjournal.com/online>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Choirunnisa. R. A. 2014. Layanan Pendidikan bagi Siswa Berkesulitan Belajar Matematika (*Dyscalculia*) di SD Negeri Giwangan Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Danarhari, F. H. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SMP Ekakapti Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. Edisi 5 Vol. VI. <http://journal.students.uny.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Delphie, B. 2009. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Sleman : PT. Intan Sejati Klaten.
- _____. 2009. *Psikologi Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus*. Sleman : PT. Intan Sejati Klaten.



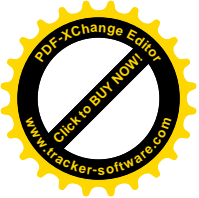
- Desmita. 2012. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dimiyati, & Mudjiono. 2013. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Elisa, S. & Wrastati, A. T. (2013). Sikap Guru terhadap Pendidikan Inklusi ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*. Vol. 2 No. 1. <http://journal.unair.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Fernandes, R. (2017). Adaptasi Sekolah terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Journal of Sociology Research Education*. Vol. 4 No. 1. Online. <http://socius.ppj.ump.ac.id/index.php/socius>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Fuadi, K. (2011). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <http://journal.alhikmahjkt.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Garnida, D. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghufron, M. N., & Risnawati, R. (2016). Kesulitan Belajar pada Anak : Identifikasi Faktor yang Berperan. *Elementary*. Volume 3 Nomor 2. <http://journal.stainkudus.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Haryono, Syaifudin, A., & Widiastuti, S. (2015). Evaluasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Vol 32 Nomor 2 Tahun 2015. <http://neliti.com/id/universitas-negeri-semarang>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Hendrowati, T.Y. (2017). Persepsi orang tua terhadap pendidikan inklusif sekolah dasar di Provinsi Lampung. *Jurnal Fokus Konseling*. Vol. 3 No. 1. <http://ejournal.stkippringsewu-lpg.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).



- Ilahi, M. T. 2013. *Pendidikan Inklusif : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : AR-RUZZ Media.
- Imaniah, I. & Fitria, N. (2018). Inclusive Education for Students With Disability. *SHS Web of Conferences* 42, *GC-TALE* 2017. <https://doi.org/10.1051/shsconf/201842000039>. (diakses tanggal 5 Januari 2019).
- Indriawati, P. (2013). Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*. Vol 1 No 1, Januari 2013. <http://ejournal.umm.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Isabella, P., Emosda, & Suratno. (2014). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131/IV Kota Jambi. *Jurnal Tekno-Pedagogi*. Vol. 4 No.2. <http://online-journal.unja.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Kadir, A. (2015). Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Volume 03, Nomor 01. <http://media.neliti.com>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/inklusif> (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Karyana, A & Widati, S. 2013. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunadaksa*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Koswara, D. 2013. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Berkesulitan Belajar Spesifik*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Kroesbergen, E.H., & Luit, J.E.H.V. (2003). Mathematic Interventions for Children with Special Educational Needs. *Remedial and special education*. Vol 24, No 2, Page 97-114. <http://journal.sagepub.com>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).



- Kurniawan. (2014). Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar Inklusi (Studi Kualitatif Deskriptif pada SD Inklusi di Jakarta Utara). *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Kustawan, D. 2012. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Lenka, S. K. & Kant, R. (2013). Problems of Orthopedically Impaired Students in Relation to their Gender, Achievement and Locality. *Journal of Education and Social Research*. Vol. 3 (2) May 2013. Online. <http://doi.org/10.5901/jesr.2013.v3n2p249>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Lestaringrum, A. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusif untuk Anak Usia Dini di Kota Kediri (Studi pada PAUD Inklusif YBPK Semampir Kecamatan Kota, Kediri). *Jurnal CARE (Children, Advisory Research and Education)*. Volume 4 Nomor 2. <http://ejournal.unipma.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Mangunsong, F. 2016. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: LPSP3 UI.
- Mardhiyah, Dawiyah, S., & Jasminto. 2013. Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus dan Strategi Pembelajarannya. *Jurnal Al Ta'dib*. Volume 3 Nomor 1. <http://ejournal.unhasy.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Mareza, L. (2016). Pengajaran Kreatifitas Anak Berkebutuhan Khusus pada Pendidikan Inklusi. *Jurnal Indigenous*. Vol. 1 No.2. <http://journal.ums.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Mastuti, D. (2014). Kesiapan Taman Kanak-Kanak dalam Penyelenggaraan Kelas Inklusi dilihat Program Kegiatan Pembelajaran. *Journal of Early Childhood Education Papers*. <http://journal.unnes.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).



- Mayasari. (2016). Implementasi Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *INKLUSI: Journal of Disability Studies*. Vo. 3, No. 1. <http://doi.org/10.14421>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Merdiasi, D. (2013). Gambaran Tunadaksa yang Bekerja. *Jurnal NOETIC Psychology*. Volume 3 Nomor 2. <http://ejournal.ukrida.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Miles, M. B. & Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, G. (2016). Pelaksanaan tugas pokok guru pendamping khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*. Volume 5 Nomor 1. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php> (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Novembli, M. S. (2015). Layanan Proses Pembelajaran Pada Anak Berkesulitan Belajar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*. Volume 4 Nomor 1. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Nurhidayati, I. 2016. Evaluasi Program Asesmen bagi Anak Tunadaksa di Sekolah Luar Biasa Ganda Daya Ananda. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Ointu, M., Mufti, M. I., & Natsir, N. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Palu. *Jurnal Katalogis*. Volume 4 Nomor 12, hlm 72-83. <http://www.neliti.com>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Pandey, S., Kurian, B. J. (2016). An Effective Way to Deal with Slow Learners : Positive Response Teaching. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*. Vol 6 Issue 6 Ver. VII PP 19-22. <http://www.iosrjournals.org>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).



Pedoman Umum Penyelenggaraan Inklusif. <http://bsnp.indonesia.org>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).

Pedoman Khusus Pembelajaran Inklusif. <http://bsnp.indonesia.org>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).

Pedoman Khusus Sarana dan Prasarana Inklusif. <http://bsnp.indonesia.org>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sarana dan Prasarana Sekolah Luar Biasa. <http://bsnp.indonesia.org>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan dan perlindungan terhadap Anak. <http://ditejnpp.kemenkumham.go.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat. <http://jdih.kemdikbud.go.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).

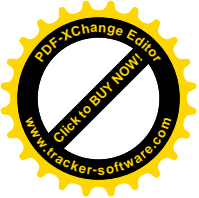
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. <http://bsnp.indonesia.org>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. <http://bsnp.indonesia.org>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).

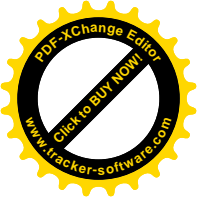
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).



- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. <http://bsnp.indonesia.org>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. <http://peraturan.bpk.go.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Praptiningrum. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*. Vol.7 No.2. <http://staff.uny.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. *DIA, Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 11, No. 1. <http://jurnal.untag.sby.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Putri, I.D. (2015). Implementasi Kurikulum 2013 bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Inklusi. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Rifa'i, A. & Anni, C.T. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Semarang : Unnes Press.
- Rohman, A. 2012. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sahidi, A. 2016. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *Tesis*. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. <http://ethesis.uin-malang.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Sari, W. Q. (2012). Pelaksanaan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*. Volume 1 Nomor 1. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Siregar, E. & Nara, H. 2017. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia



- Smith, J. D. 2015. *Sekolah untuk Semua*. Bandung: Nuansa Cendika.
- Somantri, S. 2012. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subarsono, A.G. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 2 Nomor 1. <http://journal.unair.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Sulistyaningsih, M. 2017. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Tanjung 1 Purwokerto. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Sunanto, J. (2009). Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang terdapat ABK. *JASSI_Anakku*. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2009. <http://ejournal.upi.edu>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Suryani, I. A., & Sudarto, Z. S. (2014). Persepsi Guru Reguler terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMPN se- Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Khusus*. <http://jurnalmahasiswaunesa.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Tarnoto, N. (2013). Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD. *Jurnal Humanitas*. Vol 13 No. 1. <http://journal.uad.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Tim Penyusun. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.



- Triani, N. & Amir. 2016. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Lamban Belajar*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Ummah, U. S., Pambudy, A. P. (2017). Management of Inclusive Education Institutions (A Case Study of an Inclusive Education Provider's Primary School in Bandung and Sidoarjo City, Indonesia). *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*. Vol.4 No.3. <http://doi.org/10.23918/ijsses.v4i3p122>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <http://www.komisiinformasi.go.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. <http://www.kpai.go.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. <http://pug-pupr.pu.go.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Vasudevan, A. (2017). Slow Learners – Causes, Problems and Educational Programmes. *International Journal of Applied Research* 2017. 3(12) : 308-313. <http://www.allresearchjournal.com>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Wahyuningsih, R. D. (2011). Membangun Kepercayaan Publik melalui Kebijakan Sosial Inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 15 Nomor 1. <http://jurnal.ugm.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Wahyuno, E., Ruminiati & Sutrisno. (2014). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Sekolah Dasar*. Tahun 23 Nomor 1. <http://journal.um.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Wardani, dkk. 2013. *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Tangerang : Universitas Terbuka



- Wati, E. (2014). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*. Vol. XIV No. 2. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. *Jurnal Kelola Manajemen Pendidikan*. Vol. 4 No. 1. <http://ejournal.uksw.edu>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Williamson, J. & Paul, J. (2012). The “Slow Learner” as a Mediated Construct. *Canadian Journal of Disability Studies*. <http://www.cjds.uwaterloo.ca>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).
- Yulianto, T. (2018) Pendidikan Inklusif : Konsep dasar, ruang lingkup, dan Pembelajaran. *Jurnal Kependidikan*. <http://jurnalkependidikan.iainpurwokerto.ac.id>. (diakses tanggal 5 Desember 2018).